

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Mei II Tahun 2025 No. 61

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif|Atraktif|Substantif



**RUU PPRT Beri Kepastian
Hukum Bagi Pekerja**

**Jadikan
PRT
Profesi
Layak**



dr. Gamal Albinsaid

Jangan Berhenti MENCINTAI INDONESIA*

*Bagaimana kita menghargai
para pahlawan?*

Ada satu pertanyaan penting untuk kita sebagai bangsa, dimana kita letakkan para pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan Indonesia? Tentu kita semua berharap menjadi bangsa bangsa yang selalu menghormati, menghargai, dan tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Menjadi bangsa yang pandai menempatkan para pahlawan sebagai teladan dalam kehidupan, serta menjadikan jiwa dan

semangat kepahlawanan tetap bersemayam di dada kita.

Bangsa Indonesia bertutang jasa kepada para pahlawan karena tanpa perjuangan mereka kita tidak bisa menikmati kemerdekaan hari ini. Mereka bukan hanya pahlawan bagi bangsa tapi juga pahlawan bagi kehidupan karena kehidupan tanpa kemerdekaan berarti kematian perlahan. Kepada mereka kita ucapkan terima kasih dan kita kirimkan doa terbaik,

semoga Allah SWT menerima amal ibadah, pengorbanan, dan perjuangan mereka. Alifatihah.

Bung Karno mengatakan: "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya." Penghargaan ini kita tunjukkan mulai dari mengenang para pahlawan hingga meneladani pengorbanan mereka. Kata pepatah: "Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta." Kita perlu instrumen yang efektif

untuk lebih mengenalkan para pahlawan. Mengenal pribadinya. Mengenal ide dan gagasannya. Mengenal perjuangan dan pengorbanannya untuk Republik Indonesia. Lalu, setelah mengenal diharapkan tumbuh kesadaran untuk menghormati, menghargai, dan meneladani mereka dalam dimensi perjuangan dan pengorbanan masa kini.

Saya kira inilah panggilan dan tugas sejarah bagi kita semua, yaitu melanjutkan

tradisi kepahlawanan bangsa dengan menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan Indonesia.

Sebagai bagian dari keteladanan para pahlawan, kita semua harus punya pemahaman yang benar terhadap bangsa ini. Di antara yang paling penting adalah pemahaman bahwa bangsa ini milik kita bersama. Oleh karena itu jangan berhenti mencintai Indonesia. Jadilah bagian yang menjaga kebesarannya, merawat kebhinnekaannya, mengkokohkan nasionalismenya, merekat per-satuannya, dan menumbuhkan potensinya. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, setara bahkan lebih hebat dari bangsa-bangsa maju di dunia.

Sebaliknya, janganlah kita menjadi bagian yang menghancurkan bangsa ini dengan sikap dan perbuatan yang kerdil, picik, culas, koruptif, manipulatif, dan memecah belah di tengah-tengah masyarakat. Jangan merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, merasa paling Pancasilais atau paling NKRI, karena bangsa ini terlalu besar untuk diklaim atau dikelola sendirian. Kita perlu bergandengan tangan, gotong royong, bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Itulah yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa dengan pelek kebangsaan: "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".

Kita semua bisa menjadi pahlawan masa kini. Tidak



dengan kata-kata tapi dengan karya dan tindakan nyata. Menjadi warga bangsa yang bertanggung jawab, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional dan seimbang, dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Menjadi manusia Indonesia yang taat beragama, mencintai sesama, menjaga persatuan dan kesatuan, membangun kebersamaan dan gotong royong, serta menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ekspresi kepahlawanan itu bisa beragam bentuknya selaras dengan dinamika perkembangan zaman, peluang, ancaman, dan tantangan yang kita hadapi hari ini. Artinya, kita bisa menjadi pahlawan masa kini dalam setiap peran yang kita jalani, dengan menjadi yang terbaik dalam prestasi, karya, dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pahlawan akan mengambil peran perubahan dan mencari solusi problematika bangsa. Inilah yang saya sebut di awal sebagai panggilan dan tugas sejarah untuk melanjutkan tradisi kepahlawanan bangsa dengan menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, dan kolaborator pembangunan untuk kemajuan Indonesia.

Realitas kebangsaan kita hari ini masih dihadapkan pada begitu banyak problematika yang harus diselesaikan. Kita masih terus berjuang untuk lepas dari pandemi covid 19. Dibutuh-

kan komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama semua pihak agar pandemi ini dapat diakhiri dengan izin Allah SWT.

Kita masih terus berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Berjuang meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di kancah dunia. Kita juga masih harus berjuang melawan ketidakadilan di berbagai bidang, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi serta ketidakmerataan akses pendid-

ikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kita juga masih harus berjuang mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga terwujud tata kelola negara yang semakin baik dan bersih.

Kita masih terus berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, energi, dan produk dalam negeri agar para petani, nelayan, dan tenaga kerja kita bangga dan berdaya. Kita masih berat un-

tuk lepas dari jeratan hutang luar negeri yang kian hari kian bertambah.

Pahlawan tidak akan tinggal diam melihat problematika kebangsaan di atas. Mari kita ambil peran untuk menghadirkan solusi dan perubahan fundamental dalam mengatasi persoalan di atas. Dalam konteks tersebut, Partai Keadilan Sejahtera membuka diri untuk bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa guna mendorong

dan menghadirkan kebijakan negara yang berkeadilan dan berkemajuan sehingga terwujud tujuan kemerdekaan kita: Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Bala-datun toyibatun wa Rabbun ghafur. Amiin yaa Rabbal 'alamin.

Jangan berhenti mencintai Indonesia.
Jadilah bagian yang menjaga kebesarannya,
merawat kebhinekaannya, mengokohkan
nasionalismenya, merekat per-satuannya, dan
menumbuhkan potensinya. Agar bangsa ini
menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju,
setara bahkan lebih hebat dari bangsa-
bangsa maju di dunia.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Regulasi Penyiaran Multiplatform, Aleg PKS: Harus Lindungi Kepentingan Publik dan Kebebasan Ekspresi

Jakarta (07/05) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah pasal dalam RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur penyiaran multiplatform, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, kreativitas digital, dan kemandirian media lokal.

Selain itu, dalam konteks perkembangan teknologi dan konvergensi media, dimana regulasi penyiaran tidak boleh bersifat represif atau eksklusif terhadap konten digital yang tumbuh dari masyarakat. Sebaliknya, regulasi harus adaptif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak publik dalam mengakses informasi yang beragam dan berkualitas.

"Pengaturan penyiaran multiplatform harus didasarkan pada prinsip keadilan, keberagaman, dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kita tidak boleh membiarkan regulasi digunakan untuk membungkam ruang publik digital atau membatasi jurnalisme warga," tegas Kang Aher.

Lebih jauh, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menilai terdapat beberapa dampak yang menjadi sorotan terhadap pengaturan multiplatform dalam RUU Penyiaran an-

berkurangnya ruang partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan penyiaran.

"Kita ingin memastikan bahwa revisi UU Penyiaran ini tidak menjadi instrumen pembatasan kebebasan, tetapi justru menjadi jembatan bagi tumbuhnya ekosistem media digital yang sehat, mandiri, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Oleh karena itu, pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri digital dalam pembahasan RUU ini. Menurutnya, penyiaran multiplatform merupakan realitas yang tidak bisa dihindari, namun pendekatan regulasinya harus proporsional dan demokratis," demikian tutup mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini.

tar lain yaitu potensi perluasan kewenangan KPI terhadap konten Over The Top (OTT) tanpa batasan yang jelas; tumpang tindih regulasi antara penyiaran konvensional dan konten digital; ancaman terhadap independensi konten kreator dan media alternatif; kurangnya perlindungan terhadap data pribadi dan hak digital masyarakat;

"Pengaturan penyiaran multiplatform harus didasarkan pada prinsip keadilan, keberagaman, dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Kita tidak boleh membiarkan regulasi digunakan untuk membungkam ruang publik digital atau membatasi jurnalisme warga,"

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa

Aleg PKS Ateng Sutisna Dorong Transformasi Pengadaan Tanah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Jakarta (03/05) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan pentingnya transformasi paradigma dalam proses pengadaan tanah di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan yang selama ini bersifat transaksional harus segera bergeser ke pendekatan yang lebih transformatif dan manusiawi.

"Kita harus mulai mening-

"Kita harus mulai meninggalkan pola lama yang hanya mengedepankan kompensasi uang sebagai bentuk ganti rugi. Pengadaan tanah seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,"

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI

galkan pola lama yang hanya mengedepankan kompensasi uang sebagai bentuk ganti rugi. Pengadaan tanah seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Ateng.

Lebih lanjut, Anggota DPR - RI Fraksi PKS ini menyambut positif pernyataan Wakil Menteri ATR/Waka BPN yang menekankan pentingnya keberlanjutan hidup masyarakat terdampak dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

Ia menambahkan bahwa penilaian dampak sosial (disebut Social Impact Assessment/ SIA) harus menjadi elemen utama dalam proses tersebut, terutama dalam mengidentifikasi kelompok rentan seperti petani kecil yang kerap kehilangan tanah, pekerjaan, dan akses sosial.

"SIA memungkinkan kita mengantisipasi dan memitigasi dampak sejak awal. Dengan

pendekatan ini, masyarakat tidak hanya dijadikan objek, tetapi subjek utama pembangunan. Kompensasi bukan akhir, melainkan awal dari proses pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka," jelasnya.

Ia juga mendorong adanya pembaruan sistem pertahanan nasional yang mengintegrasikan program-program pendukung seperti penyediaan hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, serta bantuan hukum.

Hal ini diyakininya sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan tanah yang berkelanjutan dan bermartabat.

"Sudah saatnya kita membangun sistem pertahanan yang adil, produktif, berstandar internasional, dan berpihak pada rakyat. Empat pilar utama: penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah harus menjadi landasan dalam reformasi ini," tutupnya.

Waspada Mafia Demokrasi, Anggota Komisi II Dorong RUU Pemilu Batasi PSU

Jakarta (07/05) — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahmat Saleh mengingatkan Revisi Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) harus mampu membatasi potensi terjadinya pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut Rahmat Saleh, hal ini penting karena PSU rentan menjadi ajang bisnis dan disusupi mafia demokrasi.

"Mumpung ini masih hangat di depan kita, ternyata PSU ini menguras energi, mengurus anggaran, bahkan menyebabkan timbulnya korban nyawa yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita berharap dalam RUU ke depan ini kita coba agar menghindari PSU terjadi," kata Rahmat Saleh dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Rahmat Saleh mengungkap faktor utama PSU bila ditekankan terjadi karena persoalan integritas dan kualitas dari penyelenggara pemilu.

Hal itu diperkuat dengan pendidikan politik di tengah masyarakat yang semakin hari semakin menjauh dari nilai nilai

demokrasi. Faktor lain yang dikhawatirkan terjadi adalah kemungkinan PSU sengaja diciptakan agar pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan.

"Bahkan ada dugaan PSU ini disengaja. Ada beberapa TPS yang kita temukan yang mereka merindukan lagi PSU. Karena apa? Karena mereka semuanya dapat ketiban 'berkah' ketika PSU terjadi," ujar Rahmat.

"Penyelenggaranya dapat honor tambahan lagi. Kemudian saksi dari partai politik dapat kerjaan lagi, kemudian masyarakat di TPS itu semuanya dapat siraman lagi. Sehingga kadang-kadang ada disengaja, sudah nanti loloskan saja 3 atau 4 orang yang mereka bukan terdaftar di sini milih. Sehingga nanti ada gugatan kemudian PSU lagi nanti, gitu ya," katanya.

Legislator dari Fraksi PKS asal Sumbang ini mewanti-wanti fenomena PSU di pilkada serentak 2024 harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan RUU Pemilu yang rencananya akan oleh dibahas Komisi 2.

Hal itu menurutnya lantaran PSU dapat menjadi celah masuknya agen-agen penyusup dari pihak tertentu. Bukan hanya pihak kandidat, bahkan oleh penyelenggara atau masyarakat yang ingin mendapat keuntungan ekonomi.

"Kalau ini terjadi, (PSU) ini bisa menjadi virus demokrasi yang ke depan ini ada agennya. Ada agen-agen yang sengaja memasukkan penyusup untuk merusak beberapa orang sehingga nanti terulang lagi PSU," kata Rahmat.

"Kalau ini terjadi tentu akan menyebabkan demokrasi kita bermasalah. Kemudian PSU ini dijadikan sebagai 'ajang bisnis' bagi orang-orang mafia-mafia demokrasi jahat. Dan ini tentu harus kita antisipasi dari sekarang lewat RUU nanti yang akan kita bahas," tegasnya.



"Mumpung ini masih hangat di depan kita, ternyata PSU ini menguras energi, mengurus anggaran, bahkan menyebabkan timbulnya korban nyawa yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita berharap dalam RUU ke depan ini kita coba agar menghindari PSU terjadi,"

H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I



image istimewa

Aleg PKS Adang Daradjatun: Optimalisasi Penerapan Tim Asesmen Terpadu Penting Dalam Pemberantasan Narkoba

Jakarta (06/05) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti berbagai tantangan serius dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senin (5/5).

Dalam pernyataannya, Adang menyampaikan data dari hasil pertemuan Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukum dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada April 2025, telah ditetapkan tiga wilayah rawan narkoba prioritas di Jakarta, yakni: Kampung Bahari, Kampung Boncos, dan Kampung Permata.

"Penetapan ini adalah langkah awal yang baik, namun perlu ditindaklanjuti dengan strategi nyata di lapangan," ujar Adang.

Lebih lanjut, ia menyampaikan data yang menunjukkan bahwa terdapat 17 titik rawan peredaran narkoba di Jakarta Barat, tersebar di 12 kelurahan. Enam kelurahan di antaranya sudah masuk dalam kategori zona merah atau sangat berbahaya, yaitu: Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Kapuk, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Palmerah. Enam lainnya berada dalam zona kuning atau waspada.

Kolaborasi TNI-Polri harus ditingkatkan Adang menegas-

kan bahwa penting bagi seluruh pemangku kepentingan terutama TNI dan Polri untuk bersinergi dalam menghadapi peredaran narkoba. Namun, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

"Kita tidak ingin niat baik dari institusi seperti TNI justru menjadi masalah hukum, maka koordinasi menjadi sangat penting, tapi juga harus diikuti dengan aplikasi yang efektif dalam pelaksanaannya," tegasnya.

Terkait penanganan pecandu dan pengguna narkoba, Adang menyayangkan bahwa hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) masih belum sepenuhnya dijadikan rujukan oleh sistem peradilan, padahal ini menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan narkoba yang tentunya, menghambat tujuan rehabilitasi dan justru memperburuk kondisi lapas dan rutan.

Aleg PKS Adang Daradjatun : Optimalisasi Penerapan Tim Asesmen Terpadu Penting Dalam Pemberantasan Narkoba

« SEBELUMNYA

"Kami di Komisi III mendukung penuh penggunaan TAT, tapi nyatanya proses hukum masih kurang menjadi pertimbangan atas rekomendasi tersebut. Akibatnya pengguna narkoba tetap dipenjara dan saat keluar, mereka rentan menjadi pengedar kecil. Ini harus jadi perhatian serius," ujar Adang.

Ia juga menekankan perlunya memperluas dan meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sosialisasi Langsung di Dapil dan Dukungan Anggaran Dalam upaya pencegahan, Adang menyatakan aktif melakukan sosialisasi langsung di daerah pemilihannya (dapil), termasuk dengan membawa contoh

(sample) jenis-jenis narkoba untuk edukasi masyarakat.

"Langkah ini penting agar masyarakat, khususnya anak muda, bisa mengenali dan menghindari narkoba sejak dini. Penyuluhan harus bersifat nyata dan menyentuh langsung ke akar persoalan," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Adang menegaskan dukungan Komisi III terhadap BNN, khususnya dalam aspek anggaran.

"Kami siap mengawal dan memperjuangkan dukungan anggaran yang memadai bagi BNN agar mereka bisa bekerja lebih optimal dalam memberantas narkoba di negeri ini," pungkasnya.



image istimewa



“Kita tidak ingin niat baik dari institusi seperti TNI justru menjadi masalah hukum, maka koordinasi menjadi sangat penting, tapi juga harus diikuti dengan aplikasi yang efektif dalam pelaksanaannya,

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI



Tanggal Lahir :
9 April 1968



Dapil
DKI Jakarta I



Keluarga
Istri : Siti Oniah
Anak: 9 Cucu: 12



Pendidikan
• SMAN 1 Jakarta (1984-1987)
• S1: Fakultas Teknik
Universitas Indonesia (1987-1994)
• S2: Master of Engineering,
Universiti Teknologi Malaya
(1998-2000)
• S3: Philosophiae Doctorate,
Universiti Teknologi Malaya
(2000-2004)



Pekerjaan
• Founder Mardani Leadership School Jakarta
• Dosen Univ. Mercu Buana (1996-sekarang)
• Anggota DPR RI (2019-2024)
& (2024-2029)
• Wakil Ketua Komisi X DPR RI (2017-2024)



Riwayat Organisasi
• Riwayat Organisasi
• Wakil Sekjen DPP PKS (2005-2010)
• Sekertaris MPP PKS (2010-2012)
• Ketua Bidang Humas DPP PKS
(2011-2015)
• Wasekjen DPP PKS (2015-2017)
• Ketua Bidang Pemuda DPP PKS
(2017-2018)
• Ketua Badan Pembinaan Kepala
Daerah DPP PKS (2018-2020)
• Ketua Bidang Teknologi Industri dan
Lingkungan Hidup DPP PKS
(2020-2022)



Dr. H.

Mardani Ali Sera

M.Eng

Publikasi Buku

- Menangkap Masa Depan Politik Indonesia (2015)
- Buku #2019GantiPresiden (2017)
- Memoar Pilkada DKI (2018)
- Buku #Kami Oposisi (2019)



Penghargaan

- Teropong Senayan Award 2019 sebagai Anggota Parlemen Pilihan Media
- PKS Award Anggota Parlemen Dekat dengan Media (2020)



Sosial Media

- X : Mardani Ali Sera,
- Instagram : Mardani Ali Sera
- Tiktok : Mardani Ali Sera,
- Facebook : Mardani Ali Sera,
- Youtube : Mardani Ali Sera
- Youtube : Indonesia Leaders Talks





image istimewa

Tiga Polisi Diduga Sindikat Narkoba, Habib Aboe Bakar Desak Bongkar Jaringan di Kaltim

Samarinda (08/05) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendesak Polda Kalimantan Timur untuk menelusuri tuntas dugaan sindikat narkoba yang melibatkan oknum personel Polresta Samarinda.

Hal ini diungkap dalam kunjungan kerjanya bersama mitra kerja Komisi III, yakni Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan BNNP Kaltim.

Kasus mencuat akhir Maret lalu ketika tiga anggota Satuan Samapta Polresta Samarinda—berinisial EP, FDS,

“Menurut saya menindak ketiga orang ini saja tidak cukup, harus diusut dan dibongkar jaringannya. Mungkin perlu dilihat apa yang dilakukan Mahkamah Agung ketika hakim PN Jakarta Pusat terkena perkara dengan KPK,”

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

dan AADS—diduga menyelundupkan sabu ke ruang tahanan dengan modus menyelipkan paket di dalam makanan.

“Bagaimana mungkin anggota kita bisa menguasai barang terlarang dan kemudian memasukkannya ke Lapas? Ini bukan pekerjaan oknum semata, melainkan tantangan untuk membongkar jaringan sindikat,” kata Aboe Bakar dalam rapat bersama Kapolda Kaltim, Kajati Kaltim dan Kepala BNNP.

Aboe meminta ada langkah integratif yang dilakukan oleh Polda Kaltim. Karena jika dilihat ini bukan sekedar penyelundupan narkoba semata.

“Menurut saya menindak ketiga orang ini saja tidak cukup, harus diusut dan dibongkar jaringannya. Mungkin perlu dilihat apa yang dilakukan Mahkamah Agung ketika hakim PN Jakarta Pusat terkena perkara dengan KPK,” terang Aboe Bakar mencontohkan adanya bedol desa 119 hakim di

Jakarta yang terjadi beberapa waktu sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aboe Bakar mengingatkan petingnya peran rehabilitasi. Kemudian dipertanyakan bagaimana operasional dari Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah.

“Bagaimana nasib balai rehab kita ini, apakah masih bisa berjalan dengan efektif. Bulan kemarin ada 11 warga dari dapil saya yang dikirim ke sana, karena di Kalsel sudah tidak ada lagi biaya untuk rehabilitasi. Kita berharap balai rehab kita di sini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala anggaran” paparnya menjelaskan.

Kunjungan Komisi III Ke Kaltim ini untuk memastikan bahwa pemberantasan narkoba dari hulu hingga hilir berjalan dengan baik. Kaltim adalah salah satu dari sepuluh wilayah yang menjadi atensi pemberantasan narkoba secara nasional.



image istimewa

Abdul Kharis Dorong Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Tantangan Zaman

Jakarta (09/05) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan

pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan guna menyempurnakan regulasi agar lebih

“Regulasi yang ada harus mampu menjawab tantangan zaman. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan hutan yang lestari dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,”

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Abdul Kharis, regulasi yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari dua dekade dan tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan terkini seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi pengelolaan hutan, serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya hutan.

“Regulasi yang ada harus mampu menjawab tantangan zaman. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan hutan yang lestari dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari proses penyusunan revisi, Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan juga melakukan penjangkaran aspirasi dari akademisi dan praktisi.

Salah satu kegiatan penjangkaran tersebut dilakukan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsppek) ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

“Kami mendorong agar proses revisi ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk kalangan akademisi dan masyarakat adat, sehingga hasilnya dapat diterima dan dijalankan dengan baik di lapangan,” tambah politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Revisi UU Kehutanan ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya konservasi hutan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global.



image istimewa

Anggota FPKS Riyono 'Caping': RUU Pangan Perlu Penguatan Pangan Lokal

Jakarta (08/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Riyono 'Caping' menanggapi perubahan ke 3 UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan sedang dibahas oleh Panitia RUU Pangan di komisi IV DPR.

Filosofi perubahan ini didasari oleh kondisi kekinian dalam hal tantangan global dan nasional dalam masalah pangan. Kondisi global adanya Trump Effect dan juga perang Rusia - Ukraina serta Timur Tengah.

"RUU Pangan perubahan

"RUU Pangan perubahan ke 3 menjadi sangat strategis dalam mendisain ulang tentang Kebijakan Politik Pangan Nasional menuju Indonesia Emas 2045, pangan kita harus kokoh dan memiliki ketahanan jangka panjang"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI

ke 3 menjadi sangat strategis dalam mendisain ulang tentang Kebijakan Politik Pangan Nasional menuju Indonesia Emas 2045, pangan kita harus kokoh dan memiliki ketahanan jangka panjang" papar Anggota Komisi IV ini.

Negara Indonesia merupakan negara tersubur dengan produktifitas produsen beras tertinggi di dunia dengan produksi beras 5,6 ton/Ha. Keberhasilan pangan yang dikonotasikan dengan beras sering membuat lupa akan makna sejati pangan sebagai gizi bukan semata komoditi.

"Pangan sebagai gizi harus memperhatikan pangan lokal sebagai inti pangan nasional kita, jangan selalu berpikir pangan sebagai komoditi semata. Pemahaman pangan sebagai gizi adalah makna

hakiki, bukan semata ekonomi" tambah Riyono.

Pangan lokal kita cukup untuk kondisi darurat, Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Pangan tersebut tersebar dari Sabang sampai merauke, cukup untuk mengantisipasi krisis pangan yang ada di depan mata.

"Pangan lokal harus menjadi meanstream pangan 20 tahun ke depan saat Indonesia Emas 2045. Perlu pasal - pasal kuat untuk menjadikan pangan lokal sebagai pangan emas ke depan" tambah Riyono.



Kawal Revisi UU Kehutanan, Aleg PKS Johan Rosihan: Jaga 30% Hutan, Tolak Eksplorasi Berlebih dan Akui Hak Adat

Yogyakarta (08/05) — Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan jaring pendapat bersama akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Kamis pagi (8/5), dalam rangka mendalami muatan strategis Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam forum yang berlangsung dinamis dan terbuka tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menegaskan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum untuk mengoreksi orientasi eksploitasi yang berlebihan dan mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagai pilar keselamatan bangsa.

“Fraksi PKS mendorong agar norma ambang batas minimal 30% kawasan hutan per pulau atau DAS dikembalikan, bukan sekadar sebagai angka teknis, tapi sebagai prinsip ekologis untuk mencegah krisis iklim, banjir, dan kekeringan,” ujar Johan Rosihan dalam sesi pendalaman.

Selain itu, PKS juga menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih ketat terkait alih fungsi kawasan hutan yang selama ini menjadi celah rusaknya hutan lindung dan mangrove.

Johan menekankan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan tidak boleh hanya didasarkan pada keputusan

administratif pemerintah pusat, tetapi perlu kajian ilmiah dan pengawasan publik.

Dalam sesi diskusi, Johan juga mengangkat pentingnya memasukkan pengakuan penuh atas hutan adat dan hak masyarakat hukum adat dalam substansi revisi undang-undang.

“Sudah saatnya negara hadir tidak hanya sebagai pemilik otoritas kehutanan, tetapi juga sebagai pelindung kearifan

lokal dan pengelola hutan berbasis komunitas,” ungkapnya.

Forum ini dihadiri oleh pimpinan Komisi IV DPR RI, jajaran akademisi UGM, serta para peneliti dan praktisi kehutanan. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu masukan penting bagi penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan draf final revisi UU Kehutanan yang akan segera dibahas di tingkat Panja.

“Fraksi PKS akan terus mengawal agar arah kebijakan kehutanan kita ke depan berorientasi pada keberlanjutan, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya,” tutup Johan Rosihan yang juga mewakili Dapil NTB I (Pulau Sumbawa).

“Fraksi PKS mendorong agar norma ambang batas minimal 30% kawasan hutan per pulau atau DAS dikembalikan, bukan sekadar sebagai angka teknis, tapi sebagai prinsip ekologis untuk mencegah krisis iklim, banjir, dan kekeringan

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

Saadiah Uluputty Soroti Disparitas Data Kemiskinan dan Tantangan Sektor Pertanian, Perikanan, serta Kehutanan

Jakarta (06/05) — Anggota DPR RI Komisi IV sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti ketimpangan tajam antara data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan World Bank terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.

la menegaskan bahwa perbedaan metodologis yang ekstrem harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam konteks kerja Komisi IV yang membina sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang merupakan tumpuan ekonomi mayoritas penduduk miskin di daerah pedesaan, pesisir, dan kepulauan.

Politisi PKS ini menguraikan, bahwa BPS mencatat angka kemiskinan nasional per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta

jiwa. Namun World Bank dalam laporan 'Macro Poverty Outlook' April 2025 mengungkapkan bahwa berdasarkan ambang batas negara berpendapatan menengah atas (US\$6,85 PPP), 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin.

"Ini bukan hanya soal statistik, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Saat rakyat kita belum mampu memenuhi standar hidup layak global, itu berarti ada masalah struktural

yang harus diselesaikan secara serius," ujar Saadiah.

Wakil Rakyat Maluku ini menyoroti bahwa sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan wajah dari kemiskinan Indonesia yang tersembunyi di balik angka makroekonomi yang tampak baik. Meskipun sektor pertanian tumbuh signifikan sebesar 10,52% (y-on-y) pada triwulan I-2025 menurut BPS, pertumbuhan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani kecil.

"Harga jual komoditas yang fluktuatif, akses pupuk yang masih terbatas, dan distribusi program bantuan yang belum merata membuat petani tetap berada di lingkaran kemiskinan," tegasnya.

Pada sektor perikanan, Saadiah menyoroti masih rendahnya keberpihakan terhadap nelayan kecil, terutama dalam konteks penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dan pembangunan kampung nelayan yang belum merata di kawasan timur Indonesia.

Sementara di sektor kehutanan, program rehabilitasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat adat masih belum mendapat porsi anggaran yang memadai.

la juga menyinggung rasio penerimaan negara terhadap PDB yang hanya 12,8%, terendah di antara negara-negara ASEAN. Hal ini mempersempit ruang fiskal untuk memperkuat layanan dasar di sektor-sektor



"Ini bukan hanya soal statistik, tapi menyangkut keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Saat rakyat kita belum mampu memenuhi standar hidup layak global, itu berarti ada masalah struktural yang harus diselesaikan secara serius,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

esensial seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.

"Pemerintah harus mulai menyusun ulang arah pembangunan nasional berbasis data kemiskinan yang lebih realistis

dan mengangkat martabat sektor-sektor rakyat seperti tani, nelayan, dan masyarakat hutan. Tanpa keberpihakan yang nyata, angka pertumbuhan hanyalah ilusi," tutup Saadiah Uluputty.

Abdul Hadi Sampaikan Langsung Aspirasi IJD Kabupaten Lombok Barat ke Menteri PU

Jakarta (08/05) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan langsung aspirasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) Kabupaten Lombok Barat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo.

Pertemuan ini berlangsung dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (07/05/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyerahkan berkas usulan IJD secara langsung di hadapan Menteri PU dan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti.

Usulan tersebut merupakan hasil dari rangkaian kunjungan kerja Abdul Hadi bersama jajaran Balai Kementerian PUPR di NTB ke Kantor Bupati Lombok Barat pada bulan April 2025, yang diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.

Selain itu, Abdul Hadi juga mencatat dukungan kuat dari

Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, yang secara langsung menyampaikan aspirasi tersebut saat berkunjung ke ruang kerja Abdul Hadi di Kompleks DPR RI pada 28 April 2025 lalu.

"Usulan IJD dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencakup 13 ruas jalan dengan total nilai sekitar Rp94 miliar. Tentunya, kami menyadari tidak semua ruas dapat terealisasi sekaligus, karena akan disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran Kementerian PU. Namun kami akan terus memperjuangkan agar sebanyak mungkin dapat terakomodasi," ujar Abdul Hadi dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Abdul Hadi

menegaskan komitmennya untuk terus menyuatkan aspirasi masyarakat NTB, khususnya di wilayah Dapil Pulau Lombok.

Ia menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang berkeadilan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Saya akan terus berjuang agar aspirasi infrastruktur di NTB tidak hanya didengar, tapi juga direalisasikan. Dengan infrastruktur yang memadai, kita berharap ada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegas Politisi PKS asal Lombok ini.

Rapat kerja ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengakselerasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya melalui program strategis seperti Inpres Jalan Daerah.



"Usulan IJD dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencakup 13 ruas jalan dengan total nilai sekitar Rp94 miliar. Tentunya, kami menyadari tidak semua ruas dapat terealisasi sekaligus, karena akan disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran Kementerian PU. Namun kami akan terus memperjuangkan agar sebanyak mungkin dapat terakomodasi,"

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

Apresiasi PKS atas Putusan MK tentang UU ITE:

Kritik adalah Vitamin Demokrasi!

MAHKAMAH KONSTITUSI

Apresiasi PKS atas Putusan MK tentang UU ITE: **Kritik Adalah Vitamin Demokrasi!**

1

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

Putusan MK: Angin Segar Demokrasi Digital

29 Maret 2025,

Melalui putusan atas pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dua putusan yang dibacakan MK, yaitu Nomor: 10/PUU-XII/2024 dan 10/PUU-XIII/2024.

Putusan ini dianggap menjadi tonggak penting dalam memperkuat kebebasan berekspresi, mencegah keterbatasan terhadap kritik publik, dan melindungi demokrasi digital di era kebangkitan informasi.

2

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

PUTUSAN NO. 10/PUU-XII/2024 KRITIK LEBIH AMAN

Pasal 37A berbunyi:
"Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi atau nama baik seseorang secara elektronik, secara lisan, dengan maksud supaya baik tersebut merugikan umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik..."

Pasal 45 (4) berbunyi:
"Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi atau nama baik yang merugikan umum dengan maksud untuk baik dengan tidak benar, secara elektronik, secara lisan, dengan maksud supaya baik tersebut merugikan umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00."

MK memutuskan frase "orang lain" dalam dua pasal tersebut tak berlaku bagi lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, serta profesi atau jabatan.

Kritik ke Institusi negara kini tak bisa dipidana "Orang lain" ≠ Lembaga negara, profesi, korporasi.

3

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

PUTUSAN NO. 10/PUU-XIII/2024 DISKUSI LEBIH BEBAS

Pasal 28 (2) berbunyi:
"Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menimbulkan dampak atau kerugian bagi orang lain, secara elektronik, secara lisan, dengan maksud supaya baik tersebut merugikan umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27a dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00."

MK memutuskan kata "kerusuhan" yang ada di kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Kerusuhan seharusnya dimaksudkan hanya pada kerusuhan yang terjadi secara fisik, bukan ruang siber.

Beda pendapat ≠ Kerusuhan

4

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

DAMPAK POSITIF

Masyarakat lebih tenang menyampaikan kritik terhadap institusi negara dan lebih leluasa dalam berdiskusi di ruang siber.

Institusi pemerintah tidak bisa melaporakan kritik yang disampaikan masyarakat di ruang siber.

Dinamika diskusi di ruang siber tidak lagi bisa dianggap sebagai kerusuhan.

Menjadi prereden baik bagi penguatan demokrasi di ruang digital.

5

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

INDEKS DEMOKRASI ASEAN

Indeks	2023	2024
Partisipasi	~6.5	~6.5
Transparansi	~6.5	~6.5
Kepercayaan	~6.5	~6.5
Korupsi	~6.5	~6.5
Kebebasan	~6.5	~6.5
Kepercayaan	~6.5	~6.5

DI ASEAN, Indeks demokrasi Indonesia menempati urutan ke-4, kalah dari Malaysia (7,9 poin), Timor Leste (7,93 poin), dan Filipina (6,63 poin).

Indeks diukur melalui 5 indikator:
1. Proses pemilu dan pluralisme
2. Fungsi pemerintahan
3. Berkeadilan politik
4. Budaya politik
5. Kebebasan sipil

Putusan MK atas pengujian UU ITE dianggap akan berdampak baik pada Indeks demokrasi Indonesia, terutama dalam indikator kebebasan sipil.

6

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

KEBEBASAN BERIKHTISAR PUBLIK, LITUASI DIGITAL, JUKA HAUS NAKI

Indeks MK menilai ruang publik siber sebagai ruang demokrasi yang penting untuk memperkuat demokrasi digital.

Kebebasan berikhtisar publik adalah hak asasi yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara.

Kebebasan berikhtisar publik yang dijamin dengan konstitusi harus dijamin dengan undang-undang yang melindungi kebebasan berikhtisar publik.

7

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300

Kita tidak ingin masyarakat buta terhadap makna kebebasan yang sejati. Putusan MK ini harus menjadi pemacu tumbuhnya public sphere yang sehat dimana warga bisa berdiskusi, mengkritik, dan turut membangun negeri tanpa rasa takut.

Tapi tentu dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab.

H. MUHAMMAD KHOLIDIS.E., M.Si
Anggota Badan Legislatif DPR RI

8

#PKS TV DPR RI | #PKS DPR RI | @pkspakar | @pkspakar | @pkspakar

number: 081219431300 | 081219431300



Dorong Transformasi Garuda Indonesia, Wakil Ketua FPKS Amin Ak Usulkan Enam Langkah Strategis

Jakarta (08/05) --- Menyikapi kerugian yang kembali dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sepanjang 2024, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mendesak manajemen Garuda segera mengambil langkah-langkah transformasi yang terukur dan berkelanjutan.

Hal itu penting agar BUMN penerbangan tersebut bangkit menjadi pendorong utama mobilitas nasional dan penggerak ekonomi.

"Garuda sudah melalui masa restrukturisasi. Tapi jika tidak ada perubahan mendasar dalam model bisnis dan efisiensi, restrukturisasi hanya akan jadi jeda sementara sebelum kerugian kembali membesar," tegas Amin AK di Jakarta, Kamis (8/5).

Amin memaparkan enam

langkah kebijakan strategis yang dapat segera ditempatkan oleh manajemen Garuda Indonesia dan pemegang saham utama, antara lain.

"Pertama restrukturisasi Armada dan Sewa Pesawat Garuda perlu segera melakukan negosiasi ulang dengan lessor asing untuk menurunkan biaya sewa dan memensiuskan pesawat tua yang tidak efisien secara operasional," ungkapnya.

Kedua, imbuhan Amin, Diversifikasi Sumber Pendapatan

Non-Tiket. Amin mendorong penguatan lini bisnis kargo, perawatan pesawat (melalui GMF AeroAsia), serta kerja sama strategis seperti codeshare internasional yang berdampak langsung pada pendapatan.

"Ketiga, Digitalisasi dan Efisiensi Operasional. Otomatisasi dan adopsi teknologi bisa menurunkan biaya tanpa mengorbankan layanan," jelasnya. Penggunaan AI dalam perencanaan rute dan bahan bakar harus diprioritaskan.

Keempat, sebut Amin, penataan rute penerbangan. Amin mendorong evaluasi rute-rute tidak produktif, dan menyarankan agar rute-rute regional atau pendek dilayani oleh anak usaha Citilink.

Kelima, lanjut Amin, Keempat Strategis Pemerintah dan Swasta. Menurutnya, pemerintah dapat menawarkan insentif terbatas, sementara manajemen perlu membuka diri pada investasi berbasis proyek atau armada dari mitra strategis.

"Keenam, Transformasi ke Model Hybrid Service. Segmentasi pasar pasca pandemi berubah. Garuda harus menyesuaikan layanan berdasarkan daya beli penumpang, tanpa kehilangan citra premium pada rute utama," tambah Amin.

Amin menekankan bahwa perbaikan Garuda harus diletakkan dalam kerangka keberlanjutan bisnis, bukan sekadar penyelamatan jangka pendek. Ia juga meminta Kementerian



perbaikan Garuda harus diletakkan dalam kerangka keberlanjutan bisnis, bukan sekadar penyelamatan jangka pendek. Ia juga meminta Kementerian BUMN untuk lebih aktif dalam memastikan pengawasan terhadap implementasi rencana pemulihan Garuda yang sudah disepakati dalam proses restrukturisasi sebelumnya.

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

BUMN untuk lebih aktif dalam memastikan pengawasan terhadap implementasi rencana pemulihan Garuda yang sudah disepakati dalam proses restrukturisasi sebelumnya.

"Garuda Indonesia adalah simbol kedaulatan udara nasional. Tapi simbol ini harus efisien, transparan, dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri," pungkasnya.



Soroti Kasus Toko Mama Khas Banjar di Kalsel, Rofik Hananto : Pendekatan Represif Mematikan Pebisnis UMKM

Jakarta (07/05) -- Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, Menyoroti kasus Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang telah menyita perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran besar di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Rofik mengatakan bahwa kejadian ini bukan sekadar insiden hukum, melainkan cermin dari pola pendekatan negara terhadap UMKM yang masih minim pembinaan dan cenderung represif.

"Pemerintah sering mendorong masyarakat untuk mencintai produk lokal dan mendukung UMKM. Namun pendekatan represif ini kontradiktif, karena memperlakukan UMKM seperti korporasi besar yang seharusnya memang tunduk pada standar yang ketat sejak awal," ujar Rofik.

Rofik menyampaikannya bahwa UMKM seperti Toko Mama Khas Banjar seharusnya dibina untuk memenuhi standar, bukan langsung dijatuhkan karena kekurangan administratif.

"Toko Mama Khas Banjar, dan khususnya adalah pelaku UMKM, mereka adalah pelaku ekonomi rakyat yang menopang ketahanan ekonomi nasional. Jangan sampai kita mematahkan semangat mereka. Yang bisa dilakukan

adalah pembinaan sebelum penindakan, lakukan pendekatan persuasif dan edukatif, beri peringatan tertulis, pelatihan, dan tenggat waktu untuk perbaikan." Ujar Rofik.

Rofik menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya soal satu toko, tetapi gambaran ekosistem pembinaan UMKM di Indonesia. Jika pendekatan hukum lebih bersifat memberdayakan daripada menghukum, UMKM kita akan tumbuh sehat dan

patuh hukum.

"Kasus Toko Mama Khas Banjar harus menjadi wake-up call bahwa pendekatan negara terhadap UMKM perlu lebih manusiawi, progresif, dan membina daripada menghukum. Jika tidak, kita akan melihat penurunan jumlah UMKM aktif, berkurangnya inovasi dan produk lokal serta meningkatnya ketimpangan antara usaha besar dan kecil." Ujar Rofik.

Rofik mengajak seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk bersinergi terhadap UMKM yang sedang berkembang di Indonesia.

"Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan UMKM bukan hanya dilindungi secara simbolik, tapi juga secara nyata melalui kebijakan dan pendekatan yang adil." Ujar Rofik.

"Kasus Toko Mama Khas Banjar harus menjadi wake-up call bahwa pendekatan negara terhadap UMKM perlu lebih manusiawi, progresif, dan membina daripada menghukum. Jika tidak, kita akan melihat penurunan jumlah UMKM aktif, berkurangnya inovasi dan produk lokal serta meningkatnya ketimpangan antara usaha besar dan kecil.

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI



Image istimewa

Untuk Penyelenggaraan Haji Lebih Baik, HNW Dukung Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekah

Jakarta (06/05) — Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi PKS yang antara lain membidangi keagamaan, Hidayat Nur Wahid, mendukung upaya Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekosistem haji,

diantaranya melalui rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekkah.

HNW sapaan akrabnya menyebut, dengan terrealisirnya ide terobosan dari Presiden Prabowo yang diharapkan menjadi 'sunnah hasanah' berupa dibangunnya 'kampung

haji Indonesia di kota suci Mekah' yang juga bisa dipakai sepanjang tahun untuk jemaah umroh dari Indonesia, maka pengembangan ekosistem haji diharapkan bisa terwujud yang berdampak positif pada penurunan biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh jemaah Indonesia, sehingga keinginan Presiden Prabowo agar biaya haji dari jemaah Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia, dapat diwujudkan.

"Selama ini, komponen biaya haji terbesar selain penerbangan, adalah akomodasi, dan konsumsi selama di Mekah. Kalau seluruh layanan tersebut bisa diintegrasikan dan disediakan langsung oleh Pemerintah Indonesia secara efisien, maka tentu biaya yang ditanggung jemaah bisa menjadi lebih rendah. Apalagi bila masa tinggal di Mekah dan Madinah bisa dikurangi dari 41 hari menjadi 30 hari saja. Ini yang juga selalu kami dorong di Komisi VIII, saat rapat kerja dengan pihak Kemenag" disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (06/05).

HNW menilai, dibutuhkan lobi tingkat tertinggi berkelanjutan agar komitmen awal pihak Saudi untuk mengizinkan pembangunan kampung haji Indonesia yang kabarnya sudah ada itu, benar-benar dapat terwujud dan segera terwujud, agar pembangunan

kampung haji di Mekkah juga bisa segera direalisasikan.

"Artinya dalam kunjungan kenegaraan terdekat ke pimpinan Kerajaan Saudi, Presiden Prabowo mementingkan untuk memastikan realisasi izin Saudi agar pemerintah Indonesia dapat segera membangun kampung Haji di Mekah. Hal yang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak," lanjutnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mengingatkan, jika Presiden ingin biaya haji turun bahkan lebih rendah dari Malaysia, selain efisiensi masa tinggal di Mekah-Madinah yang dikurangi, komponen harga tiket yang dirasionalkan, juga biaya akomodasi di kampung haji yang nanti dibebankan pada biaya perjalanan haji Indonesia harusnya jauh lebih murah daripada kalau menyewa hotel-hotel di Mekah.

Sebab dalam konteks penerbangan, meskipun sebagian besar dilayani maskapai tanah air yakni Garuda Indonesia, biayanya justru tetap tinggi.

"Itu terjadi karena antara lain perusahaan Indonesia mengenakan harga kepada jemaah haji Indonesia di level yang sama dengan perusahaan Saudi. Jangan sampai soal tarif ini terjadi juga, saat nanti kampung haji selesai. Mestinya

Untuk Penyelenggaraan Haji Lebih Baik, HNW Dukung Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekah

« SEBELUMNYA

dengan mempunyai 'kampung haji' sendiri, tarif biayanya lebih murah daripada kalau sewa hotel di Mekah," ujarnya.

Pihaknya dalam berbagai rapat kerja dengan Kemenag juga selalu menyuarakan pentingnya penurunan biaya haji.

"Maka kami memahami bila Presiden Prabowo masih belum puas dengan biaya haji tahun ini sekalipun sudah turun

bila dibandingkan dengan biaya haji tahun yang lalu, karena memang masih ada berbagai komponen pembiayaan yang bisa diturunkan seperti harga tiket dan masa tinggal di Saudi," pungkasnya.

Dan bila Presiden Prabowo menghendaki bahkan biaya haji Indonesia lebih rendah dari biaya haji di Malaysia, lanjut HNW maka Pemerintah perlu mendorong agar BPKH benar-benar dapat efektif dan inovatif

melaksanakan amanat pengelolaan keuangan Haji, sehingga menghasilkan dana manfaat yang lebih besar yang bisa menambah 'subsidi' bagi para calon jemaah haji, yang pada gilirannya akan bisa mengurangi biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah.

"Perlu juga Pemerintah mempertimbangkan pola subsidi yang diberikan oleh kerajaan Malaysia terhadap para calon jemaah haji Malaysia.

Dimana subsidi besar hingga 62% diberikan kepada calon jemaah haji Malaysia yg sudah mampu tapi masih dalam kategori B40, dan subsidi 55% bagi yang tidak masuk kategori B40," jelasnya.

Bila Indonesia bahkan ingin lebih murah dari Malaysia, maka imbuhnya, Indonesia harus bisa mengungguli kebijakan di Malaysia, yakni dengan cara meningkatkan perolehan nilai manfaat keuangan haji yang saat ini dikelola BPKH, efisiensi harga tiket, menyegerakan perwujudan kampung haji di Mekah, maupun subsidi melalui penghapusan pajak sebagian layanan yang menyediakan jasa terkait perhajian.

"Kami di Komisi VIII selalu menyoroti komponen biaya haji dan berulang kali memberikan masukan efisiensi. Bila itu semua bisa diwujudkan, termasuk segera disahkannya Revisi UU Haji dan Umroh, dan



Dalam kunjungan kenegaraan terdekat ke pimpinan Kerajaan Saudi, Presiden Prabowo mementingkan untuk memastikan realisasi izin Saudi agar pemerintah Indonesia dapat segera membangun kampung Haji di Mekah. Hal yang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak,"

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Revisi UU tentang BPKH, dan kesiapan penuh dari BPH (Badan Pengelola Haji) untuk mulai menjadi penyelenggara Haji di musim haji tahun yang akan datang, maka kebijakan Presiden Prabowo itu bisa diwujudkan, sehingga jemaah

Indonesia selain semakin ringan beban biayanya, juga bisa fokus beribadah meraih mabrur hajinya agar doanya untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur dapat dikabulkan-Nya."





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif

Selamat Menunaikan ibadah Haji

*Semoga Menjadi Haji
yang Maburr dan membawa
keberkahan bagi Indonesia*



image istimewa

Sidak TKA Ilegal, Politisi PKS Netty: Pemerintah Harus Perkuat Pengawasan dan Tutup Celah Pelanggaran

Jakarta (07/05) — Anggota DPR RI, Netty Prasetyani mengatakan bahwa upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan visa wisata sebagai langkah

“Sikap tegas Kemnaker dalam merespons isu penyalahgunaan visa wisata oleh TKA patut diapresiasi. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri sekaligus penegakan hukum ketenagakerjaan,”

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

tepat dalam melindungi pekerja dalam negeri.

“Sikap tegas Kemnaker dalam merespons isu penyalahgunaan visa wisata oleh TKA patut diapresiasi. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri sekaligus penegakan hukum ketenagakerjaan,” kata Netty, Rabu, (07/05).

Menurut Netty, penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan pelanggaran serius yang bisa merugikan tenaga kerja lokal dan memperlemah sistem pengendalian TKA di Indonesia.

“Sidak harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan TKA dan peningkatan kapasitas serta jumlah pengawas ketenagakerjaan di daerah. Pengawasan jangan bersifat reaktif, tetapi harus sistematis dan bersifat

preventif sejak awal,” katanya.

Netty juga mengingatkan pemerintah akan pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja, termasuk TKA, agar tidak menjadi korban eksploitasi akibat ketidakjelasan status dan hubungan kerja.

“Pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Ditjen Imigrasi, agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan nakal. Masuknya TKA ke Indonesia harus benar-benar selektif, sesuai kebutuhan dan keahlian yang tidak tersedia di dalam negeri,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Netty, kebutuhan akan TKA terpenuhi sesuai prosedur dan tenaga kerja lokal tidak dirugikan.



Aleg PKS Dukung Zero Accident
Penerapan SOP Baku

Monitoring Ketat dan Penguatan Sistem dalam Program MBG

Jakarta (07/05) -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungan penuh terhadap target zero accident dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dicanangkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, target ambisius tersebut hanya bisa tercapai dengan penguatan sistemik yang terukur, terutama melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan jelas di seluruh lini.

"Saya menilai langkah BGN sangat strategis. Namun, keberhasilan zero accident dalam program MBG memerlukan SOP yang tidak hanya lengkap, tetapi juga harus diterapkan konsisten, dipahami semua pelaksananya di lapangan, dan dievaluasi secara rutin," ujar Kurniasih.

Kurniasih menegaskan bahwa pembinaan sumber daya manusia yang berkelanjutan juga menjadi kunci. Ia mendorong adanya program sertifikasi bagi pelaksana serta peningkatan kompetensi berkala untuk semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi makanan.

"SDM harus terus dibekali ilmu terbaru terkait keamanan pangan. Pembinaan tidak bisa sekali selesai. Harus menjadi bagian integral dari operasional MBG," tambahnya.

Di sisi lain, Kurniasih juga menekankan pentingnya peng-

awasan berbasis komunitas. Menurutnya, melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat penerima manfaat sebagai bagian dari sistem kontrol dapat memperkuat ketahanan program.

"Pengawasan tak bisa hanya top-down. Kita butuh partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan kualitas terjaga dari hulu hingga hilir," ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan,

Kurniasih mendorong BGN untuk membangun sistem evaluasi berbasis data yang transparan, sehingga setiap insiden dapat dilacak akarnya dan menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan.

"Kita tidak boleh reaktif. Setiap laporan insiden harus menjadi bahan kajian mendalam. Dengan pendekatan ini, zero accident bukan sekadar slogan, tetapi tercapai secara nyata dan berkelanjutan," tegas Kurniasih.

Kurniasih berkomitmen mendukung segala upaya peningkatan mutu Program MBG demi memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan makanan bergizi yang tidak hanya sehat, tetapi juga aman secara mutlak.

Pembinaan sumber daya manusia yang berkelanjutan juga menjadi kunci. Ia mendorong adanya program sertifikasi bagi pelaksana serta peningkatan kompetensi berkala untuk semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi makanan.

SDM harus terus dibekali ilmu terbaru terkait keamanan pangan. Pembinaan tidak bisa sekali selesai. Harus menjadi bagian integral dari operasional MBG,"

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



image Istimewa

Komisi XI FPKS Anis Byarwati: Kajian Bank Dunia Terkait Kemiskinan Indonesia Harus Jadi Bahan Evaluasi

Jakarta (03/05) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menilai kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan menggunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP)

dan mengategorikan Indonesia berdasar standar negara upper-middle income bisa menjadi bahan evaluasi bagi BPS.

“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja

BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai Lembaga riset termasuk dari Bank Dunia. Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,”

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

menjadi masukan yang baik,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta (03/05)

Legislator Perempuan ini menyatakan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai Lembaga riset termasuk dari Bank Dunia.

“Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Meskipun demikian Anis mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlahnya lebih dari 17 ribu pulau, dengan karakteristik yang berbeda tiap wilayah dan

daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota.

“Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta I ini menyebutkan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks, akan tetap menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius.

“Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meminimalisir ketimpangan,” ujarnya.



image istimewa

Politisi PKS Muh Haris: Hilirisasi Minerba Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Jakarta (07/05) --- Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa program hilirisasi di sektor pertambangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi jargon pembangunan industri.

Hal itu ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama MIND ID dan seluruh subholding-nya yang digelar di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (6/0/2025).

"Saya mengapresiasi kerja MIND ID dalam proyek-proyek hilirisasi, tapi kita juga harus jujur bertanya: seberapa besar dampaknya untuk rakyat? Apakah pembangunan smelter dan pabrik pengolahan ini sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang?" ujar Haris saat memberikan tanggapan dalam forum tersebut.

Dalam pertemuan yang membahas 'Akselerasi Hilirisasi dan Optimalisasi Nilai Tambah Sektor Pertambangan', Muh Haris meminta agar MIND ID membuka data secara transparan terkait kontribusi finansial kepada negara.

"Kita perlu tahu, berapa sebenarnya kontribusi riil dari MIND ID? Apakah setimpal dengan sumber daya alam yang dikelola dan nilai ekspor yang dihasilkan?" katanya.

Merujuk pada paparan

Direksi MIND ID, diketahui bahwa kontribusi holding tambang BUMN itu kepada negara mencapai Rp50,1 triliun pada tahun 2023. Jumlah tersebut berasal dari pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, Haris menilai angka itu harus ditinjau secara kritis dibandingkan potensi sebenarnya yang bisa diperoleh.

"Saya tidak mengatakan itu kecil, tapi harus dilihat dari konteks potensi kita yang luar biasa. Jangan sampai banyak nilai yang hilang karena tata kelola yang belum optimal atau karena kita kalah dalam penguasaan rantai pasok global," tegasnya.

MIND ID dalam presentasinya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi yang sedang dijalankan mencakup Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Smelter Tembaga Freeport di Gresik, serta pabrik HPAL untuk pengolahan nikel di Halmahera. Semua proyek itu ditujukan

BERIKUTNYA >>>

Politisi PKS Muh Haris: Hilirisasi Minerba Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

« SEBELUMNYA

untuk mendukung ekosistem industri nasional, termasuk kendaraan listrik.

Menanggapi hal itu, Muh Haris menekankan pentingnya efisiensi dan kejelasan pembiayaan dalam setiap proyek.

“Kami ingin tahu, dari mana sumber modalnya? Apakah dari penyertaan negara, pinjam-

an, atau penerbitan obligasi? Dan apakah hasil dari investasi tersebut sudah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?” tanyanya.

Tak hanya menyoal soal fiskal, Haris juga meminta data pasti tentang penyerapan tenaga kerja. Dalam catatan MIND ID, sekitar 27.000 tenaga kerja terserap dari seluruh proyek hilirisasi hingga 2023.



image istimewa

Haris menilai angka tersebut harus terus didorong naik, terutama dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dan program pemberdayaan masyarakat.

“Kalau masyarakat sekitar tambang masih miskin, maka ada yang salah dari cara kita mengelola kekayaan alam. Hilirisasi harus memperkuat ekonomi lokal, bukan hanya mendatangkan alat berat dan kontraktor dari luar daerah,” ujarnya.

Selain itu, Haris juga menyoroti posisi MIND ID dalam menguasai pasar komoditas strategis Indonesia. Ia mempertanyakan seberapa besar pengaruh holding BUMN tersebut dibanding perusahaan tambang asing dan swasta nasional.

“Kita harus tahu peta kekuatan kita. Jangan sampai kita ini hanya menjadi pelengkap dalam industri global yang didominasi asing,” tegasnya.

Menutup tanggapannya, Haris menyerukan agar roadmap hilirisasi tidak hanya berorientasi pada profit semata, tapi juga mencerminkan tanggung jawab ekologis dan keadilan antargenerasi.

“Pasal 33 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah tolok ukur utama dalam menilai sukses tidaknya MIND ID,” pungkasnya.



“Saya mengapresiasi kerja MIND ID dalam proyek-proyek hilirisasi, tapi kita juga harus jujur bertanya: seberapa besar dampaknya untuk rakyat? Apakah pembangunan smelter dan pabrik pengolahan ini sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang?”

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI



Dorong Akselerasi Energi, Aleg PKS Nevi Zuairina: Saatnya Indonesia Gaspol ke Energi Hijau!

Jakarta (05/05) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya percepatan transisi energi nasional menuju energi bersih dan terbarukan. Hal ini ia sampaikan pada RDPU atau audiensi antara komisi XII dengan IESR.

Dalam momentum audiensi Komisi XII dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunda akselerasi energi baru terbarukan (EBT), apalagi ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand telah jauh melangkah lebih cepat dalam pemanfaatan energi bersih.

“Negara kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Tapi ironisnya, pemanfaatan kita masih sangat minim. Energi surya misalnya, dari potensi lebih dari 200 GW, baru dimanfaatkan sekitar 0,13%. Kita tertinggal, padahal dunia sudah bergerak cepat,” tegas politisi PKS ini.

Menurut Nevi, perlambatan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut bahwa target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional yang sebelumnya ditetapkan sebesar 23% pada 2025, kini direvisi turun menjadi 17-19%.

“Penurunan target ini adalah tanda lampu kuning. Kita

perlu konsistensi kebijakan dan eksekusi nyata. Tidak cukup hanya punya peta jalan, tapi harus diwujudkan ke proyek-proyek konkret yang menjangkau masyarakat,” tambahnya.

Wakil rakyat Sumatera Barat II ini juga menyoroti persoalan klasik yang terus menjadi penghambat: pendanaan. Ia menyebut bahwa kebutuhan transisi energi Indonesia hingga 2060 bisa mencapai USD 1 triliun, sementara realisasi investasi energi terbarukan per tahun masih di bawah USD 2 miliar. Untuk itu, Nevi mendorong DPR dan pemerintah lebih serius

menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk memperkuat peran BUMN, insentif fiskal, serta membuka akses untuk pembiayaan hijau dan mitra internasional seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Saya berharap Komisi XII dapat mendorong agar RUU EBT yang sedang dibahas di DPR benar-benar menjadi landasan hukum yang progresif, tidak hanya sekadar legalisasi teknis, tapi membawa lompatan dalam investasi dan pemanfaatan energi bersih secara inklusif,” ujarnya.

Nevi menyatakan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada keberanian mengambil keputusan hari ini.

“Kita tidak hanya bicara energi, ini soal ketahanan, kemandirian, dan keadilan bagi generasi mendatang. Jangan biarkan Indonesia tertinggal,” pungkas Nevi Zuairina.

“Negara kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Tapi ironisnya, pemanfaatan kita masih sangat minim. Energi surya misalnya, dari potensi lebih dari 200 GW, baru dimanfaatkan sekitar 0,13%. Kita tertinggal, padahal dunia sudah bergerak cepat,”

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi XII DPR RI

Komisi XIII FPKS Hamid Noor Yasin Minta Evaluasi Layanan Rehabilitasi Pasca Rusuhnya Lapas Narkotika Muara Beliti

Jakarta (09/05) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang terjadi pada Kamis (08/05/2025).

Kejadian ini diduga berkaitan dengan penolakan warga binaan terhadap razia oleh petugas pemsayarakatan.

“Kerusuhan ini menjadi alarm keras terhadap efektivitas layanan rehabilitasi dan pembinaan di Lapas narkotika. Lapas seharusnya bukan hanya tempat penahanan, tapi tempat pemulihan. Kalau yang terjadi justru kerusuhan, itu berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi,

termasuk dalam hal pendekatan kepada warga binaan,” tegas Hamid.

Pria yang juga disapa akrab HNY tersebut juga menilai bahwa dirinya mendukung upaya preventif yang dilakukan pihak petugas lapas dengan melakan razia terhadap barang-barang terlarang di lapas.

Meskipun demikian, Hamid juga memandang bahwa tindakan itu mesti disertai upa-

ya-upaya yang lebih persuasif dan simpatik terhadap warga binaan.

Sebagai Anggota Komisi XIII yang membidangi urusan Imigrasi dan pemsayarakatan, Hamid menyoroti aspek layanan rehabilitasi medis dan sosial dalam lapas narkotika yang dinilai perlu lebih dioptimalkan.

Ia menegaskan bahwa sistem pembinaan dan rehabilitasi harus lebih mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis pemulihan, bukan hanya penindakan.

Hamid mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemsayarakatan serta instansi terkait, termasuk BNN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program rehabilitasi di Lapas Narkotika.

Selain itu, Hamid juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pembina dan konselor adiksi di lingkungan lembaga pemsayarakatan, serta memastikan hak-hak warga binaan atas layanan kesehatan dan rehabilitasi terpenuhi secara layak dan transparan.

“Fungsi pemsayarakatan harus selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan sosial. Kerusuhan seperti ini hanya akan menghambat upaya reintegrasi sosial para warga binaan,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Hamid Noor Yasin juga meminta agar peristiwa ini tidak hanya ditangani secara reaktif,



“Kerusuhan ini menjadi alarm keras terhadap efektivitas layanan rehabilitasi dan pembinaan di Lapas narkotika. Lapas seharusnya bukan hanya tempat penahanan, tapi tempat pemulihan. Kalau yang terjadi justru kerusuhan, itu berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi, termasuk dalam hal pendekatan kepada warga binaan,”

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

tapi dijadikan momentum pembenahan sistemik dalam penyelenggaraan pemsayarakatan, khususnya yang menyangkut penanganan kasus narkotika.

“Diperlukan upaya pem-

benahan secara komprehensif dalam penyelenggaraan pemsayarakatan, baik terhadap warga binaan, maupun terhadap petugas lapas itu sendiri,” pungkasnya.

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atroaktif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internships)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Ketua BKSAP DPR RI FPKS Mardani Ali Sera Serukan De- Eskalasi Konflik India- Pakistan dan Dorong Penyelesaian Damai

Jakarta (08/05) -- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada hari ini.

Serangan militer India yang dikenal dengan nama 'Operasi Sindoor', yang mendapatkan respons tegas dari Pakistan, telah menciptakan ketegangan bersejarah di kawasan Asia Selatan, termasuk laporan mengenai jatuhnya pesawat tempur India dan korban jiwa di kedua negara.

Kejadian ini berawal dari serangan yang terjadi di Pahalgam, Jammu Kashmir, India, pada 22 April 2025, yang merenggut nyawa 26 wisatawan. Kelompok The Resistance Front yang berbasis di Pakistan telah

mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Meskipun Pemerintah Pakistan membantah keterlibatan mereka dalam peristiwa di Pahalgam. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, tetap mengancam kejadian ini sebagai tindakan terorisme lintas batas. Sehingga terjadi serangan balasan India ke wilayah yang dianggap sarang teroris.

Maka dari itu, Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa konflik India-Pakistan akan berdampak serius, serta

mengancam stabilitas baik regional maupun global, terutama mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir.

"Kami mendukung pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan lebih mengutamakan dialog diplomatik guna mencegah meluasnya konflik," jelas Mardani.

Sebagai mitra strategis bagi kedua negara, menurut Mardani, BKSAP DPR RI meminta Pertama, Perlindungan Warga Sipil. Kedua negara wajib menjamin keselamatan warga sipil dan menjaga infrastruktur vital, termasuk proyek-proyek kemanusiaan.

"Kedua, BKSAP DPR RI mendukung inisiatif perdamaian melalui forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan AIPA untuk memfasilitasi proses mediasi," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Ketiga, imbu Mardani, segera hentikan Aksi Militer. Pihak India-Pakistan harus segera melakukan gencatan senjata dan menghindari tindakan provokatif.

"Keempat, penyelesaian sengketa, termasuk isu Kashmir secara menyeluruh, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," sebut Mardani.

"Kami mengajak komunitas internasional, termasuk parlemen dari negara-negara yang mendukung penyelesaian



"Kami mengajak komunitas internasional, termasuk parlemen dari negara-negara yang mendukung penyelesaian damai, untuk berkumpul dan mempromosikan de-eskalasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi.

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI

damai, untuk berkumpul dan mempromosikan de-eskalasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi. Harapan kami adalah agar India dan Pakistan segera kembali ke meja perundingan demi tercapainya perdamaian dan keamanan kawasan yang lebih baik," lanjut Mardani.

Untuk itu, BKSAP terbuka untuk berpartisipasi dalam

upaya diplomasi parlemen untuk mempromosikan penyelesaian damai dengan ini, melalui kerja sama dengan AIPA dan Majelis Parlemen SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation/ organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Selatan) dan badan-badan antar-parlemen lainnya.



image istimewa

RUU PPRT Beri Kepastian Hukum dan Jadikan Pekerja Rumah Tangga Profesi Layak

Jakarta (07/05) --- Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal Albinsaid, menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah dan semua pihak yang telah mendorong kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, JALA PRT, dan KKMI, dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"Kami berharap RUU PPRT ini bisa memberikan kepastian hukum dengan mengimplementasikan empat nilai. Pertama (yaitu) keadilan, kesejahteraan, lalu kemanusiaan dan kepastian hukum," ujar Gamal dalam RDPU Baleg DPR RI, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan kilas balik dari perjalanan RUU PPRT ini sebelumnya yang selama tiga periode DPR RI, RUU ini belum disahkan. Mengingat, sejarah panjang pengusulan RUU ini sudah sejak tahun 2004.

"Kita tahu di periode sebelumnya penyusunan dan harmonisasi telah selesai di Baleg dan telah pengambilan keputusan pendapat mini fraksi

pada 1 Juli 2020, tetapi kita menunggu tiga tahun, sampai 21 Maret 2023, RUU PPRT ini disahkan menjadi inisiatif DPR. Namun sayangnya sampai akhir masa tugas, periode 2019-2024, RUU PPRT belum dibahas oleh Komisi IX bersama pemerintah sehingga tidak bisa menjadi carryover," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gamal menegaskan pentingnya menjadikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai profesi yang layak dan bermartabat dalam kerangka legislasi nasional.

Selain itu, ia menekankan bahwa esensi dari RUU ini adalah menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai "decent work" atau pekerjaan layak yang menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Dalam proses selama ini kita melihat banyak PRT itu belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat. Sehingga, (harapannya)

RUU PPRT Beri Kepastian Hukum dan Jadikan Pekerja Rumah Tangga Profesi Layak

« SEBELUMNYA

bagaimana undang-undang ini bisa kita susun dengan satu semangat utama, bukan hanya menjadi sebuah formalitas pengakuan, tetapi bagaimana kita mampu meningkatkan harkat martabat, marwah dari pekerjaan PRT sebagai pekerjaan yang bermartabat dan bisa setara dengan yang lain," tegas Politisi Fraksi PKS itu.

Ia juga menekankan pentingnya memasukkan berbagai

aspek dalam draf RUU, seperti, pengakuan PRT sebagai pekerja, jaminan kerja dan perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, hak atas imbalan kerja, perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, dan harta benda, serta Hak untuk merasa aman dan bebas dari penyesalan serta perlakuan yang merendahkan.

"Dengan demikian harapan kita undang-undang ini bisa memastikan PRT bisa



image istimewa

mendapatkan asasinya dengan perlindungan hukum yang kuat, minim atau mampu mitigasi risiko eksploitasi dan kekerasan, serta memberikan pengakuan status PRT sebagai pekerja," harapnya.

Dalam forum tersebut, Gamal juga mengajukan sejumlah pertanyaan kritis kepada para narasumber dari masyarakat sipil. Ia menanyakan apakah masih terdapat aspek dalam draf RUU versi 2021–2023 yang perlu diperbaiki, serta bagaimana solusi terhadap praktik buruk dari pihak penyalur atau outsourcing PRT yang kerap merugikan pekerja.

Ia juga mengusulkan pembentukan unit khusus perlindungan PRT di bawah Kementerian Ketenagakerjaan atau Ombudsman, serta pentingnya membangun mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses oleh para PRT.

Menutup pandangannya, Gamal mendorong agar penyusunan RUU ini sejalan dengan Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 yang menjamin hak-hak dasar PRT, mulai dari upah layak, jam kerja wajar, cuti tahunan, jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan, hingga hak untuk berserikat dan berunding.

"Harapan kami, nilai-nilai dalam konvensi ini bisa benar-benar hadir di rumah-rumah rakyat Indonesia melalui regulasi yang kuat," pungkasnya.



“Dalam proses selama ini kita melihat banyak PRT itu belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat. Sehingga, (harapannya) bagaimana undang-undang ini bisa kita susun dengan satu semangat utama, bukan hanya menjadi sebuah formalitas pengakuan, tetapi bagaimana kita mampu meningkatkan harkat martabat, marwah dari pekerjaan PRT sebagai pekerjaan yang bermartabat dan bisa setara dengan yang lain,”

dr. GAMAL ALBINSALD
Anggota Badan Legislasi DPR RI



image istimewa

Anggota DPR RI Riyono Caping Salurkan Bantuan Ratusan Ton Benih Padi dan Jagung di Magetan

Magetan (05/05) — Anggota DPR RI Dapil VII, Riyono yang biasa disapa Riyono Caping menyalurkan bantuan benih padi dan jagung kepada kelompok tani di Kabupaten Magetan, Senin (5/5/2025).

Bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan DPR RI dan akan didistribusikan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Magetan. Penyaluran benih padi

“Jadi nanti sesuai dengan jadwal tanam, pengajuan dari desa, titik lokasi, dan kelompok tani masing-masing. Penyaluran dilakukan berdasarkan usulan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang sudah diajukan,”

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI

akan mencakup 13 kecamatan, sementara benih jagung akan disebar ke 10 kecamatan. Total bantuan benih padi yang diberikan sebanyak 125 ton, yang diperkirakan mampu mencakup lahan seluas 5.000 hektare.

Sedangkan untuk benih jagung, jumlahnya mencapai 27 ton, cukup untuk ditanam di lahan seluas 1.800 hektare. Tenaga Ahli DPR RI Riyono, Mohamad Arifin, mewakili Riyono menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara bertahap.

“Jadi nanti sesuai dengan jadwal tanam, pengajuan dari desa, titik lokasi, dan kelompok tani masing-masing. Penyaluran dilakukan berdasarkan usulan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang sudah diajukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman DTPHP Maget-

an, Romandhon, menjelaskan bahwa pendistribusian benih akan segera dilakukan sesuai dengan kesiapan lokasi dan waktu tanam.

“Untuk benih padi disebar di 13 kecamatan dan jagung di 10 kecamatan. Ini akan didrop sesuai dengan CPCL yang sudah masuk,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh benih yang disalurkan diberikan secara gratis kepada petani tanpa pungutan biaya apa pun.

“Tidak ada pungutan baik dari dinas maupun dari kementerian. Ini bantuan murni dari pusat. Yang jelas ini semua untuk masyarakat Magetan,” tandasnya.



image istimewa

15 Rumah Rusak, 100 Jiwa Terdampak, Haji Ateng Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Sumedang (07/05) --- Anggota DPR RI dari Dapil IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna atau yang akrab disapa Haji Ateng, menunjukkan kepedulian tinggi

terhadap warga terdampak bencana di Desa Cislak, Kecamatan Cisarua, Kab. Sumedang.

Haji Ateng saat berkomunikasi melalui Video Call WhatsApp langsung dengan masyarakat yang sedang dirundung duka akibat pergerakan tanah yang menyebabkan kerusakan pada 15 rumah dan berdampak terhadap 100 jiwa.

Kehadiran Haji Ateng bukan hanya sebagai bentuk simpati, tetapi juga aksi nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak.

"Saya ikut merasakan apa yang saudara-saudara saya alami. Ini bukan hanya musibah mereka, tapi juga duka kita bersama," ungkap Haji Ateng saat komunikasi melalui Video Call WhatsApp.

Bantuan beliau disambut hangat oleh warga. Tidak

datang dengan tangan kosong, Haji Ateng membawa berbagai bantuan seperti sembako, alat mandi, hingga makanan untuk anak-anak.

Bantuan ini diharapkan mampu sedikit meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban masyarakat yang tertimpa musibah," ujarnya.

Langkah cepat dan responsif Haji Ateng ini menjadi bukti nyata bahwa wakil rakyat hadir bukan hanya saat kampanye, tetapi juga di saat rakyatnya sedang membutuhkan.

Warga pun merasa diperhatikan dan berterima kasih atas bantuan serta kehadiran langsung wakil mereka di parlemen.

"Saya ikut merasakan apa yang saudara-saudara saya alami. Ini bukan hanya musibah mereka, tapi juga duka kita bersama,"

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrif Substantif

DIPLOMASI PARLEMEN



Kunjungan Resmi Fraksi
PKS kepada Mitra Fraksi
di Luar Negeri &
Ambassador's Talks

Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI
melalui peran diplomasi parlemen, menjalin
persahabatan dan kerjasama dengan para
duta besar, parlemen negara sahabat,
organisasi internasional, dan mitra strategis
internasional lainnya



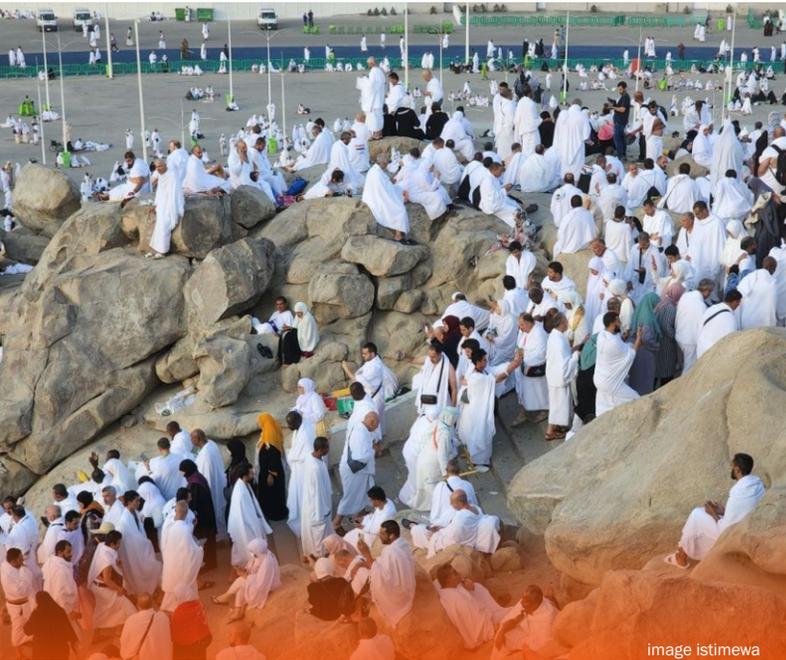


image istimewa

Aleg PKS Harap Kemenag Atasi Keterlambatan Keberangkatan Jamaah Haji NTB Akibat Belum Terbitnya Visa

Jakarta (06/05) --- Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, berharap agar kementerian khususnya panitia penyelenggaraan haji segera atasi keterlambatan keberangkatan Jamaah Haji asal Nusa Tenggara Barat akibat belum terbitnya visa dari pihak Arab Saudi.

Menurut Abdul Hadi, situasi ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal apabila pemerintah secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres penerbitan visa calon jamaah haji, serta menjaga koordinasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi.

"Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal," tegas Abdul Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Selasa, (06/05).

Berdasarkan hasil koordinasi antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, diketahui bahwa Kemenag telah memasukkan seluruh data calon jamaah ke dalam sistem sejak jauh hari.

Namun, kendala terjadi karena sistem di pihak Saudi yang belum dapat menerbitkan

visa secara optimal. Kemenag memastikan bahwa seluruh calon jamaah akan tetap diberangkatkan pada kloter berikutnya, kecuali sebagian kecil yang memiliki masalah keimigrasian di masa lalu.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi juga menyoroti kesiapan teknis di sektor transportasi. Ia mengingatkan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja Komisi V agar memastikan ketersediaan pesawat dan pelayanan handling di bandara berjalan maksimal.

"Jangan sampai kejadian seperti tahun 2024 terulang, di mana keterlambatan penerbangan terjadi hingga puluhan kali," ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.

Pada fase pertama pemberangkatan haji tahun 2024 (12-30 Mei), tercatat 48 kali keterlambatan penerbangan: 42 oleh Garuda Indonesia dan 6 oleh Saudia Airlines. On Time Performance (OTP) keseluruhan

Aleg PKS Harap Kemenag Atasi Keterlambatan Keberangkatan Jamaah Haji NTB Akibat Belum Terbitnya Visa

« SEBELUMNYA

hanya mencapai 86,99%, dengan Garuda Indonesia mencatat OTP 78,68%, dan Saudia Airlines 96,51%.

Penyebab keterlambatan antara lain masalah teknis pesawat sewaan dan keterlambatan penyelesaian proses penyelesaian yang berdampak pada pengajuan slot penerbangan di Arab Saudi.

Abdul Hadi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan kerja keras semua pihak demi memberikan kenyamanan maksimal bagi para Tamu Allah.

Seperti yang diketahui Presiden Prabowo menjadi

pemimpin pertama di RI yang melepas jemaah haji secara resmi ada hari Ahad, 4 Mei 2025 yang lalu dan berpesan semua aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Kita semua harus kerja keras untuk melaksanakan amanah Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ini adalah amanah besar. Kita semua harus berkoordinasi secara intensif agar pelayanan kepada para jemaah haji berjalan lancar dan layak, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap mereka yang telah menunaikan ibadah besar ini,” tutup Abdul Hadi.



“Kami ingin memastikan bahwa setiap pihak yang mendapatkan izin usaha pertambangan, termasuk Ormas Keagamaan, Kampus, dan UKM, agar mampu menjalankan kewajibannya secara profesional. Hal ini mencakup kemampuan teknis, pengelolaan lingkungan, hingga manajemen administratif yang baik,”

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Dorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata Riau, Hendry Munief Kembali Gelar Pelatihan bagi Pegiat Wisata

Pekanbaru (04/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief kembali melaksanakan kegiatan pelatihan buat pegiat wisata Riau.

Ditargetkan dari kegiatan ini para pegiat wisata makin gencar mempromosikan destinasi dan event wisata di Provinsi Riau.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pekanbaru pada hari Jumat-Sabtu (02-03/05/2025) ini merupakan event pelatihan ke 4 dan 5 oleh Kementerian Pariwisata di Provinsi tahun 2025.

Kegiatan ini mengambil tema 'Sosialisasi Strategi Pemasaran dan Promosi Event Daerah' yang langsung dihadiri Anggota DPR RI Hendry Munief, Asisten Deputi Even Daerah Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Perwakilan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, komunitas tour dan travel hingga pegiat wisata sebagai peserta.

Asisten Deputi Even Daerah Kementerian Pariwisata Reza Fahlevi menyampaikan bahwa even kali ini berkat aspirasi dari Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA yang merupakan mitra Kementerian Pariwisata.

"Acara hari ini berkat inisiatif bapak Hendry Munief yang meminta Kemepar melaksanakan pelatihan,

diseminasi dan lainnya Kepariwisataan di Riau. Ada 7 kelas yang Kemepar laksanakan. Semua diisi oleh pegiat wisata dan UMKM," kata Reza Fahlevi.

Dia menjelaskan bahwa Kemepar mendorong adanya even wisata secara rutin baik level lokal, nasional bahkan internasional di setiap daerah.

Karena even wisata ini, imbuhnya, akan menggerakkan ekonomi daerah seperti perhotelan, transportasi, UMKM, kuliner dan lainnya. Apalagi menurutnya saat ini kita membutuhkan berbagai faktor untuk mendukung target presiden agar ada pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Seperti kita ada membuat event KharismaEvent Nusantara yang mengulirkan even daerah di level nasional. Dari Riau ada Pacu Jalur, Bakar Tongkang, Festival Bono. Kita juga menunggu even lain usulan dari Riau yang dapat kita masukkan ke dalam kalender even nasional," tegas Reza lagi.

Sementara itu Hendry Munief menjelaskan bahwa Sektor Pariwisata adalah salah satu ujung tombak pemenuhan

Dorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata Riau, Hendry Munief Kembali Gelar Pelatihan bagi Pegiat Wisata

« SEBELUMNYA

target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai arahan presiden.

Dia menilai para mitra Komisi VII DPR RI dapat dikolaborasi dalam mendukung hal ini.

"Mitra Komisi VII itu ada Kemenpar sendiri, Perindustrian, UMKM, Ekraf dan beberapa media yang dikelola oleh pemerintah. Jika sektor-sektor

ini dikolaborasikan, maka ini bakal menjadi satu kesatuan penting mendukung kemajuan pariwisata nasional." kata Hendry Munief.

Dia juga mendorong agar seluruh masyarakat Riau dapat menjadi Duta Pariwisata daerah. Setiap individu dapat mempromosikan potensi-potensi wisata lokal.

"Caranya mudah, dengan masing-masing menjadikan media sosial, koneksi dan

lainnya untuk mempromosikan destinasi wisata Riau. Gunakan seluruh media sosial. Setiap kita mengunjungi destinasi wisata, setiap kita ada even, setiap kita menikmati kuliner, kita masukkan dalam media sosial masing-masing sampaikan hal-hal positif." tambahnya.

Pelatihan kepariwisataan ini menurutnya salah satu langkah awal dia untuk memperkuat sektor pariwisata di Riau. Program ini menurutnya berkat komunikasi aktif dia dengan Kemenpar sehingga dapat dilaksanakan di Riau untuk 7 kelas pelatihan.

"Insyallah kita masih ada dua kelas pelatihan lagi. Jika tidak ada perubahan pekan depan kita adakan di Duri dan Dumai." tegasnya.



Setiap individu dapat mempromosikan potensi-potensi wisata lokal. Caranya mudah, dengan masing-masing menjadikan media sosial, koneksi dan lainnya untuk mempromosikan destinasi wisata Riau. Gunakan seluruh media sosial. Setiap kita mengunjungi destinasi wisata, setiap kita ada even, setiap kita menikmati kuliner, kita masukkan dalam media sosial masing-masing sampaikan hal-hal positif."

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I



Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Fikri Faqih: Pemahaman Pilar Kebangsaan Krusial bagi Generasi Muda

Slawi (03/05) --- Ratusan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Kabupaten Tegal mendapat pembekalan penting mengenai kebangsaan

melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Kegiatan ini digelar pada Rabu (30/4/2025) bertempat di Aula DPD PKS Kabupaten Tegal, Kalisapu, Slawi.

Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih. Dihadapan puluhan peserta yang antusias, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan materi mengenai makna mendalam dari konstitusi, pentingnya Pancasila bagi pemuda, alasan fundamental pemilihan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membekali para mahasiswa KIP Kuliah de-

ngan pemahaman kebangsaan yang kuat, menjadikan mereka generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kokoh dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Pria yang akrab disapa Fikri ini menekankan bahwa pemahaman terhadap pilar-pilar kebangsaan sangat krusial, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

"Konstitusi, dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945, berfungsi sebagai landasan hukum utama, menjamin Hak Asasi Manusia, membatasi kekuasaan negara, menjadi pedoman bernegara, menjamin keadilan sosial, dan merupakan sumber hukum tertinggi," jelasnya.

Mengenai peran Pancasila, pria yang akrab disapa Fikri ini

secara khusus menyoroti relevansinya bagi kalangan mahasiswa.

"Pancasila sangat penting bagi pemuda,"ujarnya.

"Di antaranya untuk membentuk karakter dan kepribadian, meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai luhur, membangun nasionalisme dan solidaritas, membantu menghadapi tantangan global, serta yang terpenting, menjadikan kalian agen perubahan positif di masyarakat," jelas Fikri.

Lebih lanjut, dijelaskan pula alasan kuat para pendiri bangsa memilih NKRI sebagai bentuk negara. Bentuk negara kesatuan dinilai paling tepat untuk mewadahi persatuan bangsa yang majemuk, menjaga keutuhan di tengah keberagaman, memungkinkan efisiensi pengelolaan negara dari pusat ke daerah, serta mencegah potensi perpecahan yang dapat terjadi pada bentuk negara lain.

Makna 'Bhinneka Tunggal Ika' pun tak luput dari



"Konstitusi, dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945, berfungsi sebagai landasan hukum utama, menjamin Hak Asasi Manusia, membatasi kekuasaan negara, menjadi pedoman bernegara, menjamin keadilan sosial, dan merupakan sumber hukum tertinggi,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

pembahasan. Semboyan ini dipilih karena secara sempurna mencerminkan kondisi

Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan ras, namun tetap terikat dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh. Semboyan ini menjadi cermin identitas sekaligus landasan mempersatu bangsa.

Menutup materinya, Fikri berpesan bahwa pembinaan ge-

nerasi muda untuk menyongsong 'Indonesia Emas' membutuhkan upaya komprehensif.

Selain pemahaman kebangsaan, dibutuhkan pula pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan, penanaman jiwa kepemimpinan, serta kesadaran akan pentingnya persatuan dan keberagaman. Inovasi, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam pembangunan juga menjadi kunci utama.

Soroti Isu Keselamatan Jalan Raya di Dapil

Meitri Upayakan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya

Mojokerto (05/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani melakukan kunjungan inspeksi mendadak dalam kegiatan pembongkaran median jalan di Jalan Raya Puloniti, Bangsal, Mojokerto, tepat di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) Mojokerto pada Senin (05/05).

Pembongkaran ini dilakukan menyusul seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut.

Dalam sidak tersebut, Meitri menyoroti pentingnya penanganan menyeluruh terhadap titik rawan kecelakaan. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah minimnya penerangan jalan yang dinilai turut meningkatkan risiko kecelakaan di malam hari.

“Turut prihatin dengan tingginya angka kecelakaan di lokasi ini. Pembongkaran medi-

an jalan ini baru langkah awal, Inshaa Allah ke depan akan kami upayakan peningkatan fasilitas keselamatan, terutama penerangan jalan lewat kanal legislatif yang tersedia,” ujar Meitri di lokasi.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menyatakan komitmennya untuk mengadvokasi pemasangan lampu penerangan jalan tenaga surya di sepanjang ruas jalan rawan kecelakaan ini. Dia menambahkan, pihaknya akan membawa temuan ini saat menggelar rapat dengan

Kementerian ESDM selaku mitra Komisi XII DPR RI.

“Hasil dari sidak ini adalah kami akan mendesak Kementerian ESDM agar penerangan jalan tenaga surya bisa dipasang di titik-titik rawan kecelakaan seperti di depan SPN ini. Penerangan yang memadai dapat meminimalisir risiko kecelakaan, terutama di malam hari. Ini kami harap dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama setelah sidak agar ruas jalan yang rawan ini tidak kembali memakan korban,” tegasnya.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini juga mengapresiasi langkah koordinatif lintas lembaga, termasuk Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang telah merespons cepat masukan dari masyarakat melalui pembongkaran median jalan.

Meitri juga menekankan pentingnya sinergi antar-komisi di DPR RI, terutama dengan Komisi V DPR RI yang membina transportasi dan infrastruktur, guna mendorong kebijakan keselamatan jalan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Komunikasikan dan kerjasama yang berhasil terbangun lintas komisi di DPR, utamanya dengan Ibu Reni Astuti selaku Anggota Komisi V DPR RI, adalah hal yang sangat positif. Saya sangat mengapresiasi respons positif yang diberikan dan berharap ke depan kita



“Hasil dari sidak ini adalah kami akan mendesak Kementerian ESDM agar penerangan jalan tenaga surya bisa dipasang di titik-titik rawan kecelakaan seperti di depan SPN ini.

Penerangan yang memadai dapat meminimalisir risiko kecelakaan, terutama di malam hari. Ini kami harap dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama setelah sidak agar ruas jalan yang rawan ini tidak kembali memakan korban,”

Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VIII

bisa bersama-sama mendorong penataan ulang infrastruktur jalan ini diiringi dengan kebijak-

an mitigasi jangka panjang demi keselamatan warga,” pungkasnya.



image istimewa

Cegah Tanah Bergerak Terulang, Aleg PKS Fikri Faqih Tekankan Kajian Geologi dan KLHS

Jakarta (05/05) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih, mendesak dilakukannya kajian komprehensif untuk mencegah terulangnya bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Pria yang akrab disapa Fikri ini menekankan pentingnya studi geologi mendalam serta peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses perencanaan pembangunan.

Fikri menyoroti kondisi tanah di Mendala yang dinilai sangat labil, menyebabkan rumah warga yang semula bagus pun terdampak. Ia menyambut baik kesediaan sebagian warga untuk direlokasi.

Politikus PKS ini juga menekankan perlunya edukasi publik mengenai titik rawan bencana serta tanda-tanda awal pergerakan tanah, seperti gerakan pada 'badan, ekor, dan mahkota' lereng.

"Masyarakat harus diedukasi tentang titik tanah bergerak, semua pihak perlu mengawal, perlu sosialisasi,"ujarnya dalam keterangan tertulis.

Secara khusus, Fikri mengapresiasi tanggap darurat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia mengapresiasi Gubernur Achmad Luthfi yang turun langsung ke lokasi dan mengucurkan dana Rp2,01 miliar pada Jumat (2/5) untuk perbaikan rumah dan tempat ibadah. Rencana

kajian pemindahan permukiman ke lokasi lebih aman juga dinilai positif.

Saat ini, 432 warga masih mengungsi sambil menunggu relokasi. Lahan huntau telah disiapkan, dengan dua lokasi alternatif di Desa Manggis dan Bumiwah tengah dikaji.

"Terkait Huntau, kajian geologi diperlukan untuk memastikan keamanan lokasi sebelum pembangunan dimulai,"tandas legislator dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini

Berdasarkan kajian Dinas ESDM Jateng menyebut lokasi terdampak di Mendala memang tidak layak huni.

Secara geologi, area tersebut masuk formasi rambatan yang tanahnya mengembang besar jika banyak air, menjadikannya rawan pergerakan.

Solusinya, kata Fikri, adalah mengurangi masukan air ke tanah atau relokasi.

Selain itu, Fikri juga menyoroti masukan warga mengenai dugaan penyebab

Cegah Tanah Bergerak Terulang, Adeg PKS Fikri Faqih Tekankan Kajian Geologi dan KLHS

« SEBELUMNYA

bencana, seperti penambangan galian C dan alih fungsi lahan di bagian atas. Dia menegaskan dugaan ini perlu dibuktikan melalui kajian komprehensif.

"Ini aspirasi warga terdampak bencana beberapa waktu lalu, tetapi memang baru dugaan atau hipotesis, sehingga perlu kajian komprehensif dari Badan Geologi dan Dinas ESDM Jateng," jelasnya.

Menyambung perlunya

kajian holistik, peraih gelar Doktor Ilmu Lingkungan (DIL) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang ini menekankan peran krusial KLHS.

Fikri menjelaskan, KLHS memandang kebencanaan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang terkait erat dengan kondisi lingkungan.

Inti KLHS terkait kebencanaan adalah memastikan kebijakan, rencana, dan program (KRP) mempertimbangkan potensi risiko bencana,

kerentanan, dan kapasitas lingkungan, guna mewujudkan pembangunan tangguh bencana dan berkelanjutan.

Fikri menambahkan, untuk isu lintas daerah seperti sungai atau penyebab dominan alih fungsi/penambangan, kajian idealnya dilakukan oleh ESDM Provinsi atau dalam konteks RTRW provinsi/eco-region.

Mengacu pada temuan ESDM Jateng tentang karakteristik tanah Mendala, ia kembali menekankan kehati-hatian dalam memilih lokasi baru.

"Untuk relokasi, memang harus dipertimbangkan dan dikaji secara matang, terutama dari formasi tanahnya agar tidak mengalami nasib yang sama," pungkas Fikri.



Image istimewa



Berdasarkan kajian Dinas ESDM Jateng menyebut lokasi terdampak di Mendala memang tidak layak huni. Secara geologi, area tersebut masuk formasi rambatan yang tanahnya mengembang besar jika banyak air, menjadikannya rawan pergerakan. Solusinya adalah mengurangi masukan air ke tanah atau relokasi.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Pimpin Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia, Mahfudz Abdurrahman Dorong Pencak Silat jadi Tren Budaya Anak Muda

Jakarta (06/05) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menerima tongkat estafet kepemimpinan sebagai Ketua Umum Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) dari pengurus lama, Dr. Nur Ali yang disahkan secara aklamasi oleh jajaran pendiri dan pengurus inti KPSTI, akhir pekan lalu.

Secara khusus, Mahfudz mendorong pencak silat tradisi sebagai tren baru di kalangan anak muda, khususnya millennial dan gen Z.

"Baru saja dilakukan pergantian kepemimpinan ketua Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia dari pak Nur Ali kepada saya. Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman pendiri dan pengurus KPSTI semuanya, dan mudah-mudahan saya dapat menjalankan organisasi ini dengan baik, dengan profesional, sehingga nilai-nilai kebudayaan kesenian pencak silat ini dapat berkembang dan dapat dilestarikan dengan baik," ucap Mahfudz dalam sambutannya.

Menurut Anggota DPR RI dapil Kota Bekasi dan Kota Depok tersebut, terdapat dua (2) organisasi yang mewadahi pencak silat di Indonesia saat ini.

"(yang pertama) IPSI berfokus pada prestasi, sebagai cabang olahraga yang bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di pentas internasional,"

jelasnya.

Sedangkan, Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) akan lebih berfokus pada nilai-nilai budaya atau kesenian yang ada dalam pencak silat itu sendiri.

"Karena ada 3 dimensi dalam pencak silat: dimensi seni/ budaya, dimensi beladiri, serta dimensi olahraga, jadi kedepan KPSTI akan bersinergi dengan IPSI dalam kedua fokus tersebut," imbuhnya.

Mahfudz, yang juga merupakan Pembina IPSI Kota Bekasi ini berharap, keberadaan KPSTI akan mampu memberi support kepada kementerian Kebudayaan yang baru dibawah Fadli Zon.

"Sehingga eksplorasi nilai budaya yang kata Menteri kebudayaan, bahwa Indonesia sebagai ibukota kebudayaan, itu betul-betul bisa kami support dengan mengembangkan organisasi KPSTI," tegas dia.

Dirinya juga berharap,

Pimpin Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia, Mahfudz Abdurrahman Dorong Pencak Silat jadi Tren Budaya Anak Muda

« SEBELUMNYA

kesenian pencak silat tradisi yang kaya dengan beragam tarian, bukan hanya mendapat pengakuan UNESCO, namun sebagai warisan budaya tak benda, pencak silat dapat diakui, dikenal, bahkan dinikmati oleh masyarakat dunia sebagai satu produk kebudayaan dan hiburan.

“Untuk semua ini dibutuhkan inovasi dan kreatifitas supaya anak-anak muda milenial tidak merasa malu dan ketinggalan dengan pencak silat, tetapi juga mengandrungi kebudayaan Indonesia ini dengan segala kreatifitas

dan inovasinya. doakan kami bisa mengembangkan semuanya bersama organisasi KPSTI,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum lama, Dr. Nur Ali menambahkan, pihaknya melihat pencak silat sebagai bagian tak terpisahkan dan menjadi identitas Indonesia.

“Pencak silat sebagai salah satu identitas budaya dan nilai-nilai kepribadian (karakter) yang punya nilai luhur,” ungkap Nur Ali.

Dirinya dan seluruh teman-teman pendiri merasa beruntung dengan terpilihnya Mahfudz Abdurrahman sebagai Ketua Umum yang baru akan mampu

mengangkat dan mengekspos pencak silat.

“Kalau bukan dari sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Mahfudz Abdurrahman pencak silat lebih terangkat dan terekspos lagi,” harapnya.

Nur Ali sepakat bahwa Pencak silat harus menyesuaikan perkembangan zaman dan menjadi tren baru di kalangan anak muda.

“Supaya tidak ketinggalan dan ditinggalkan, bila ada zamannya, tentu ada orangnya, dan KPSTI juga tidak hanya Bersama komunitas, tapi termasuk di dalamnya ada IPSI, sebagai bagian tak terpisahkan.”

Sebelumnya, Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) dibentuk sebagai tanggung jawab anak bangsa pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Selain itu, pencak silat sebagai khazanah budaya dan tradisi asli bangsa Indonesia. kini sudah go publik di dunia internasional, bahkan diakui sebagai warisan budaya tak benda (intangible heritage) oleh UNESCO pada 2019 lalu.

KPSTI diharapkan menjadi lokomotif budaya pencak silat di nusantara maupun dunia internasional dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal

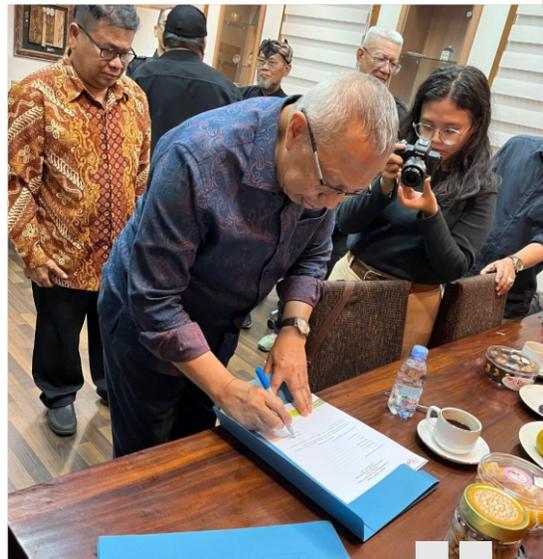


image istimewa

Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman pendiri dan pengurus KPSTI semuanya, dan mudah-mudahan saya dapat menjalankan organisasi ini dengan baik, dengan professional, sehingga nilai-nilai kebudayaan kesenian pencak silat ini dapat berkembang dan dapat dilestarikan dengan baik,”

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Komisi VIII DPR RI

Aksi Bela Palestina di Sumbar, Rahmat Saleh: Ini Bukan Isu Satu Golongan

Padang (05/05) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan perjuangan membela kemerdekaan Palestina bukan semata tanggung jawab satu golongan, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan tertentu.

Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan sikap bersama seluruh rakyat Indonesia dan konsensus nasional yang sudah lama dijaga oleh parlemen.

Pernyataan ini disampaikan Rahmat Saleh dalam aksi Bela Palestina bersama puluhan ribu masyarakat Sumbar yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Minggu (04/05/2025).

"Perjuangan membela kemerdekaan Palestina bukan milik satu partai atau ormas saja. Ini adalah perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan," ujar Rahmat dalam orasinya di hadapan massa aksi.

Rahmat menambahkan, sikap politik Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas, yakni mendukung penuh kemerdekaan bangsa tersebut sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam pandangannya, tidak ada ruang untuk keraguan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi penjajahan yang terus berlangsung.

"Di DPR RI, tidak ada perbedaan sikap dalam isu ini. Semua fraksi, baik di DPR maupun DPD, sepakat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bukan soal ideologi, tapi soal kemanusiaan," tegasnya.

Menurutnya, berbagai upaya diplomatik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah

Indonesia harus terus diperkuat, baik di tingkat bilateral maupun melalui forum internasional seperti OKI dan PBB.

Dia menilai, solidaritas dari masyarakat juga penting sebagai bentuk tekanan moral global terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan wilayah lain di Palestina.

Rahmat juga mengapresiasi langkah berbagai elemen masyarakat di Sumatera Barat yang aktif menggalang bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Dia menyebut gerakan solidaritas tersebut sebagai bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia tidak tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Palestina.

"Ini bukan hanya sekadar simpati. Ini adalah bentuk nyata solidaritas dan keberpihakan kita pada nilai-nilai kemerdekaan dan hak asasi manusia," katanya.

Rahmat berharap, semangat membela Palestina tidak berhenti pada momen-momen aksi belaka.

Dorongan agar masyarakat, khususnya generasi muda, terus menyuarakan isu ini di ruang publik, media sosial, hingga kegiatan pendidikan dan dakwah.

Tak hanya itu, peningkatan literasi publik terhadap sejarah perjuangan Palestina juga diperlukan.

"Kita harus terus jaga api solidaritas ini. Jangan sampai padam. Ini bukan isu musiman,



"Perjuangan membela kemerdekaan Palestina bukan milik satu partai atau ormas saja. Ini adalah perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan,"

**H. RAHMAT SALEH,
S.Farm., M.IP**

Anggota Komisi II DPR RI

ini perjuangan kemanusiaan," tutupnya..

Aksi bela Palestina ini diawali dengan Long March dari Masjid Raya Sumbar menuju

Lapangan Kantor Gubernur Sumbar. Kegiatan ini juga menggalang berbagai donasi untuk Palestina yang terkumpul hingga ratusan juta rupiah.



image istimewa

Peduli Lingkungan Hidup, Haji Jalal Kunjungi Tempat Pengolahan Sampah Bekasi

Bekasi (03/05) — Peduli Lingkungan Hidup, Anggota DPR RI Dapil Jabar 7 dari Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir melakukan kunjungan ke sebuah Tempat Pengelolaan Sampah bernama Waste4 Change, Kawasan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jumat (02/05).

Selama di lokasi, Anggota Komisi 12 ini menyaksikan langsung proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh Waste4 Change sejak sampah masuk hingga produk akhir hasil olahan yang sebagian besar bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat.

” Yang harus segera dilaksanakan adalah melakukan langkah-langkah edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih siap ketika nanti ada peraturan pemerintah tentang pengolahan sampah mandiri jadi diberlakukan.

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

”Target Pak Presiden Prabowo, permasalahan sampah Indonesia harus bisa selesai dalam lima tahun. Karena salah satu indikator negara maju adalah permasalahan sampah sudah bisa diselesaikan dengan oleh masyarakat itu sendiri.” ungkap Haji Jalal mengutip pernyataan Presiden RI, Prabowo yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq dalam acara rapat dengan komisi 12.

”Salah satu upaya penyelesaian permasalahan sampah oleh masyarakat sendiri adalah dengan cara membangun tempat-tempat pengolahan sampah ditengah-tengah lingkungan masyarakat terkait. Mereka dilibatkan dalam proses pengolahan sampahnya hingga mereka sadar bahwa sampah yang mereka hasilkan ternyata bisa ber-

nilai ekonomi untuk kesejahteraan mereka juga selain mampu meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka juga.” tambah Haji Jalal.

Setelah menyaksikan proses pengolahan, lalu mendengarkan presentasi dari pihak Waste4 Change tentang kemanfaatan produk olahan sampah, Haji Jalal optimis masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan pengolahan sampah mereka sendiri secara mandiri.

” Yang harus segera dilaksanakan adalah melakukan langkah-langkah edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih siap ketika nanti ada peraturan pemerintah tentang pengolahan sampah mandiri jadi diberlakukan.” pungkasnya.



Fraksi PKS Apresiasi Nakes Indonesia Di Gaza

dan Dorong Kolaborasi Antarnegara Hentikan Kekejaman Israel





image istimewa

Saadiah Uluputty Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Wilayah Kepulauan Maluku

Ambon (02/05) — Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Anggota DPR RI dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku.

la menyebut bahwa pendidikan harus menjadi pintu keadilan sosial yang menyentuh seluruh pelosok, bukan hanya kota-kota besar.

Politisi PKS ini menyoroti fakta bahwa meskipun angka melek huruf di Maluku telah mencapai 99,32 persen pada

“Pendidikan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah masa depan Maluku. Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum membudayakan keadilan pendidikan. Kami di parlemen akan terus mengawal kebijakan ini dengan sungguh-sungguh,”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

2024, namun masih banyak tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak-anak di usia sekolah menengah. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SMA/SMK hanya 69,61 persen, yang artinya 3 dari 10 anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. “Ini bukan soal kemauan, tapi soal kemampuan. Keluarga nelayan dan petani yang menjadi mayoritas penduduk Maluku masih kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya, apalagi ketika akses ke sekolah menengah hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut yang mahal dan tidak menentu,” ujar Saadiah.

Legislator Maluku ini juga menyoroti rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini. Data BPS menunjukkan bahwa 75,63 persen anak usia 0–6 tahun belum atau tidak mengikuti pra sekolah.

“Ini kehilangan masa emas tumbuh kembang. Negara harus hadir lewat PAUD yang merata dan berkualitas, terutama di desa-desa terpencil,” lanjutnya.

Sebagai anggota Fraksi PKS dan Komisi IV DPR RI, Saadiah menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan anggaran pendidikan yang berpihak pada daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Ia juga mendorong integrasi kebijakan pendidikan dengan pembangunan sektor kelautan, pertanian, dan kehutanan sebagai strategi menyeluruh membangun keluarga-keluarga di kepulauan.

“Pendidikan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah masa depan Maluku. Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum membudayakan keadilan pendidikan. Kami di parlemen akan terus mengawal kebijakan ini dengan sungguh-sungguh,” tutup Saadiah Uluputty.



Nevi Zuairina Serukan Dukungan Penuh untuk Kemerdekaan Palestina

Jakarta (05/05) --- Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyerukan dukungan penuh kepada rakyat Palestina yang terus menghadapi penjajahan dan kekerasan tanpa henti.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik wilayah, melainkan soal kemanusiaan dan hak asasi manusia yang telah diinjak-injak selama puluhan tahun.

"Rakyat Palestina telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan harapan karena kebrutalan yang terus berlangsung dari hari ke hari. Dunia tidak boleh lagi bungkam. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk berdiri bersama mereka," ujar Nevi.

Politisi PKS ini mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak hanya berhenti pada solidaritas doa, tetapi juga mengambil langkah konkret seperti menyebarluaskan informasi yang benar mengenai kondisi Palestina, membantu penggalangan dana kemanusiaan, dan terus menyuatkan kemerdekaan palestina.

Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi Indonesia yang mengusung semangat anti penjajahan.

"Dukungan terhadap

kemanusiaan yang mendukung perjuangan Palestina.

Nevi mengatakan, Sikap tegas ini menjadi cerminan konsistensi Fraksi PKS di DPR RI dalam membela hak-hak rakyat tertindas, serta menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia harus terus digelorakan di forum-forum internasional.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan doa dan harapan agar rakyat Palestina segera meraih kemerdekaan dan hidup dalam kedamaian sebagaimana bangsa-bangsa merdeka lainnya.

"Kita tidak boleh lelah menyuarakan kebenaran. Palestina harus merdeka. Itu harga mati," tegas Nevi Zuairina.

"Rakyat Palestina telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan harapan karena kebrutalan yang terus berlangsung dari hari ke hari. Dunia tidak boleh lagi bungkam. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk berdiri bersama mereka,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



DMI Riau Dukung Aleg PKS Hendry Munief Kembangkan Pariwisata Halal

Pekanbaru (04/05) --- Riau sebagai negeri berbudaya Melayu nan agamis dirasa cocok untuk dikembangkan pariwisata halal. Sektor ini diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan masyarakat.

Hal itu terungkap saat pertemuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Riau dengan anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief di Hasanah Guest House pada Kamis (01/05/2025).

Pertemuan yang berlangsung dengan skema dialog dan diskusi itu berlangsung hangat. Terlihat Hendry Munief mencatat berbagai pandangan dan saran para pengurus DMI Riau yang hadir.

Ketua DMI Riau, Mizan Asnawi saat memulai dialog menyampaikan bahwa sektor Pariwisata Halal dapat menjadi pionir pengembangan pariwisata dan industri pendukungnya ke depannya. Riau sebagai negeri berbudaya dan agamis sangat untuk itu.

"Dulu pernah berkembang pesat destinasi wisata religi Masjid Islamic Center Rokan Hulu. Pengurus saja saat itu bisa mengumpulkan hingga miliaran rupiah per bulan dari sektor ini. Harusnya seperti di Kota Pekanbaru, keberadaan masjid Agung An Nur dapat digarap lebih maksimal," terang Mizan yang disimak serius oleh Hendry Munief.

Dia menjelaskan bahwa DMI Riau turut serta mendukung industri pariwisata halal di Riau selama ini. Ada beberapa program DMI yang mendukung pariwisata seperti Gerakan Shubah di Masjid (GSM), dimana salah satu daya tariknya adalah jamaahh yang hadir membawa pulang mayur sebagai bekal

sehingga turut mendukung UMKM.

"Kemudian kita ada juga Pelatihan Guide Masjid dan Masjid preneur. Dimana pengurus Masjid dan dai diberikan pelatihan bagaimana menjadi memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah terutama jamaah yang singgah atau dari luar kota. Dan juga Masjid sebagai pusat ekonomi umat, pemberdayaan UMKM." kata dosen UMRI ini.

Dia berharap agar Hendry Munief turut mendukung pembinaan para dai, remaja dan pengurus masjid di sektor kepariwisataan, ekonomi kreatif dan UMKM sebagai mitra komisi VII DPR RI.

Hendry Munief saat dialog tersebut mengapresiasi langkah DMI Riau selama ini dalam pembinaan masjid dan jamaahnya. Dia menyebut, sepeksi masjid sebagai rumah ibadah harus dikembalikan ke fungsi awal ketika Rasulullah SAW membangun masjid. Dimana masjid dijadikan sebagai pusat peradaban islam.

Dia juga menyanggupi permintaan DMI Riau agar adanya kolaborasi dan pembinaan para dai ke depannya.

"Program-program DMI ini patut kita dukung. Ada masjid-preneur, guide masjid, ada juga GSM yang mendorong peran aktif UMKM. Kita juga ingin ke depannya muncul embrio semangin seperti Masjid Jogokariyan, Masjid Munzalan di Riau. Mas-



Program-program DMI ini patut kita dukung. Ada masjidpreneur, guide masjid, ada juga GSM yang mendorong peran aktif UMKM. Kita juga ingin ke depannya muncul embrio semangat seperti Masjid Jogokariyan, Masjid Munzalan di Riau. Masjid bukan lagi tempat ibadah tapi juga pusatnya aktifitas masyarakat,"

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I

jid bukan lagi tempat ibadah tapi juga pusatnya aktifitas masyarakat," terangnya.

Terkait pariwisata halal, dia menyampaikan sangat cocok dikembangkan di Riau. Apalagi katanya Pemprov Riau sudah punya Pergub terkait pengembangan pariwisata halal ini.

"Ke depan ini akan jadi

tanggungjawab kita bersama.

Kita dukung pemerintah daerah mengembangkan pariwisata halal. Tentu juga butuh dukungan dari komunitas, badan usaha hingga pelaku UMKM dan Pegiat wisata atas hal ini. Saya siap berkolaborasi dengan semua pihak," tutupnya.



Lepas Jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar, Meity Rahmatia: Kuatkan Mental dan Spiritual Menuju Haji Mabrur

Makassar (05/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan, Meity Rahmatia melepas secara resmi Kloter 5 Embarkasi Makassar, Ahad (04/05/2025) di Aula Mina, Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Meity yang bermitra dengan kemigrasian di Komisi XIII, mengajak Jamaah Calon Haji (JCH) meluruskan niat dan menjaga kesehatan sagar dapat mengikuti seluruh rangkaian haji di tanah suci.

"Insy Allah, kuatkan mental, spiritual kita, menuju tujuan kita. Haji mabrur. Saya doakan semua. Selamat sampai tujuan," jelasnya saat memberi sambutan dari atas podium.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga turun dari panggung, mengajak 392 JCH yang berasal dari Gowa dan Makassar bertalbiyah bersama.

Meity berharap dapat berjumpa dengan Embarkasi Gowa-Makassar di tanah suci nanti.

"Kebetulan saya masuk dalam tim pengawas haji dari Komisi XIII. Insy Allah kita akan ketemu di sana. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang sakit, sampaikan. Petugas sudah siap," ungkapnya.

Selain itu, ia mengapresiasi pula kinerja Ali Yafid selaku Ketua PPIH Embarkasi Makassar dalam

melayani jemaah haji melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Imigrasi.

Sebelumnya, Ketua PPIH Embarkasi, Ali Yafid menyampaikan bahwa Embarkasi Makassar tahun ini memberangkatkan 15.856 jemaah dari 8 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

"Dua provinsi lainnya adalah Gorontalo dan Maluku yang merupakan Embarkasi

Antara, dimana jemaahnya tidak lagi transit di asrama haji Makassar. Khusus Sulsel sebanyak 7.272 jemaah," ungkapnya.

Prosesi pelepasan ini turut dihadiri Kakanwil Imigrasi Sulsel, Fierce Sumolang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, dan para pejabat administrator lingkup Kakanwil Kemenag Sulsel yang juga bertindak selaku PPIH Embarkasi Makassar.

Diinformasikan, jemaah kloter 5 diterbangkan dengan GIA 1105 pukul 16.24 Wita dan diperkirakan tiba di Bandara Madinah pukul 01.00 Waktu Arab Saudi.

Seorang jemaah gagal berangkat, atas nama Hasnawati Yasang (57), karena sakit dan dirawat di Rumah Sakit Tadjuddin Chalid.

"Kebetulan saya masuk dalam tim pengawas haji dari Komisi XIII. Insy Allah kita akan ketemu di sana. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang sakit, sampaikan. Petugas sudah siap,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sulawesi Selatan I



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA M. ADRIAN RASHAD



Saksikan Setiap Pekan



Terima Lembaga Adat Melayu (LAMR) Riau, Aleg PKS Hendry Munief Sambut Baik Status Daerah Istimewa untuk Riau

Jakarta (05/05) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melalui Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau I menerima kunjungan audiensi dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)

pada Senin (05/05) di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas aspirasi masyarakat Riau untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai Daerah Istimewa, yang berlandaskan pada kekayaan budaya dan peran historis Riau dalam perjalanan bangsa.

Fraksi PKS menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mengawal langkah-langkah advokasi yang ditempuh oleh LAMR.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS dapil Riau I, Hendry Munief, menilai bahwa pendekatan budaya adalah elemen penting dalam pembangunan nasional.

"Kami di Fraksi PKS menyambut baik aspirasi LAMR. Kami meyakini bahwa pendekatan budaya adalah fondasi dalam membangun peradaban bangsa," ujar Hendry dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh yang turut hadir juga menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi ini di parlemen.

"Kami siap memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat Riau untuk memperoleh status daerah istimewa. Ini bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi tentang penghargaan terhadap sejarah, budaya, dan kontribusi Riau terhadap bangsa Indonesia," tegas Rahmat.

LAMR dalam paparannya menjelaskan bahwa pengajuan status Daerah Istimewa tidak bermaksud memisahkan diri atau menciptakan keistimewaan yang diskriminatif, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara atas nilai-nilai adat dan kebudayaan Melayu yang telah lama hidup dan berkembang di Riau.

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga adat, demi menjaga keutuhan bangsa dan merawat kebudayaan sebagai aset nasional yang tak ternilai.



"Kami di Fraksi PKS menyambut baik aspirasi LAMR. Kami meyakini bahwa pendekatan budaya adalah fondasi dalam membangun peradaban bangsa,"

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I





image istimewa

Aleg PKS Dapil Maluku Utara Alqassam Kasuba Sambut Baik Audensi DPRD Halmahera Utara

Jakarta (07/05) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku Utara (Malut), Izzuddin Alqassam Kasuba menyambut baik audensi yang diadakan oleh DPRD Halmahera Utara (Halut) dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat setempat.

Audensi ini dilangsungkan di Gedung DPR/MPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta, pada Selasa 6 Mei 2025.

"Hari ini disela-sela agenda yang padat, Saya sangat senang dapat menyambut dan menerima audiensi dari DPRD Halmahera Utara dalam rangka memperjuangkan Aspirasi Masyarakat," ungkap Al-Qassam.

Dalam pernyataannya, Al-qassam Kasuba menyampaikan harapannya agar seluruh aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan secara bersama oleh seluruh pihak.

la menekankan pentingnya

kerja sama antara DPR RI dan DPRD dalam upaya mewujudkan Halmahera Utara yang lebih baik di masa depan.

"Semoga semua aspirasi dapat kita perjuangkan bersama untuk menjadikan Halmahera Utara yang lebih baik kedepannya," ujarnya.

Alqassam dikesempatan yang sama berharap, dialog yang digelarnya bersama Anggota DPRD Halut, dapat menghasilkan solusi konkret untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Halut.

"Hari ini disela-sela agenda yang padat, Saya sangat senang dapat menyambut dan menerima audiensi dari DPRD Halmahera Utara dalam rangka memperjuangkan Aspirasi Masyarakat,"

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara



Terima Aspirasi Pemekaran Galela-Loloda, Ateng Sutisna: Harus Didukung dengan Kajian Serious

Jakarta (06/05) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima kunjungan dari Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Galela-Loloda.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (06/05).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, yang turut menerima aspirasi tersebut bersama Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyampaikan komitmen Fraksi PKS untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk terkait pemekaran wilayah.

“Fraksi PKS membuka diri terhadap aspirasi pemekaran Galela-Loloda ini. Tapi tentu harus didukung dengan kajian

yang matang dan sesuai prosedur perundang-undangan,” ujar Ateng Sutisna.

Ateng menegaskan bahwa pemekaran daerah bukan hanya soal keinginan masyarakat, tetapi juga menyangkut kesiapan administratif, anggaran, dan kelayakan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta pelayanan publik.

Sementara itu, Izzuddin Alqassam Kasuba yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Utara menyampaikan bahwa aspirasi pembentukan DOB Galela-Loloda telah lama diperjuangkan dan didukung oleh banyak pihak di daerah,

termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

“Galela-Loloda punya potensi besar, baik dari aspek sumber daya alam maupun kesiapan masyarakatnya. Kami di Fraksi PKS siap mengawal prosesnya di tingkat pusat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Izzuddin.

Dalam pertemuan ini, delegasi DPRD Halmahera Utara yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Halut menyampaikan dokumen resmi aspirasi pembentukan DOB Galela-Loloda, disertai argumentasi historis, geografis, dan administratif.

Fraksi PKS menyambut baik inisiatif ini dan akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, termasuk mengkaji dokumen pendukung dan mendorong adanya rapat kerja bersama mitra terkait di Komisi II DPR RI.



“Fraksi PKS membuka diri terhadap aspirasi pemekaran Galela-Loloda ini. Tapi tentu harus didukung dengan kajian yang matang dan sesuai prosedur perundang-undangan,”

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI

Pelajar Sukabumi Kunjungi Gedung DPR,

Aleg PKS Slamet Beri Pesan dan Motivasi Soal Fungsi DPR

Jakarta (06/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Jawa Barat IV, Slamet, menerima kunjungan edukasi para pelajar dari Yayasan Citarasa Kebaikan Pelajar Sukabumi di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (06/05).

Dalam sambutannya, Slamet memberikan motivasi kepada siswa agar meluruskan niat saat berada di DPR. Ia menekankan bahwa niat yang tulus menjadi landasan penting dalam setiap ibadah dan aktivitas positif di parlemen.

Selain itu, Slamet mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah SWT sebagai sumber keberhasilan.

"Mari kita kuatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Insya Allah apa yang kita inginkan dan cita-citakan akan dikabulkan," kata Slamet.

Dengan memperkuat ikatan rohani, kata dia, para pelajar akan lebih siap menghadapi tantangan dan meraih cita-cita. Dia juga memberikan contoh-

contoh kecil, misalnya bagaimana Al-Quran dan sajadah yang tersambung dengan Allah menjadi mulia, untuk memperjelas makna dekat dengan Tuhan.

Slamet mendorong para siswa melihat diri sebagai generasi penerus bangsa yang kelak aktif di parlemen.

"Mudah-mudahan nanti di antara kalian ada yang menjadi anggota DPR RI," ujarnya menyemangati siswa agar sejak dini menyiapkan diri melalui pendidikan dan organisasi.

Slamet mengajak para siswa membangun pribadi yang solid, menghargai orang tua, dan berprestasi di berbagai bidang, agar kelak dapat membatu perubahan bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Slamet pun

menjelaskan tiga fungsi utama DPR RI guna memberikan pemahaman lembaga legislatif kepada pelajar.

"Tugas pertama DPR RI adalah membuat undang-undang, atau legislasi. Kemudian, tugas kedua adalah penganggaran (budgeting) untuk menyetujui rencana APBN, dan tugas terakhir adalah pengawasan," tambahnya.

Slamet menegaskan, apabila kursi DPR diisi oleh orang-orang baik yang takut kepada Allah, maka Indonesia akan menjadi 'kuat, adil, dan sejahtera'.

Penjelasan tersebut, dimaksudkan agar para pelajar memahami peran DPR RI dalam kerangka konstitusi dan kesejahteraan rakyat.

Di akhir acara, Slamet mengucapkan terima kasih kepada para pembina yayasan dan siswa yang hadir.

Ia berharap kunjungan ini menjadi pengalaman berharga dan penyemangat bagi para pelajar dalam menapaki masa depan.



Apabila kursi DPR diisi oleh orang-orang baik yang takut kepada Allah, maka Indonesia akan menjadi 'kuat, adil, dan sejahtera'.

dr. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat IV



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025, Reni Astuti Tegaskan Komitmen Kawal Kebebasan Pers di Era AI

Surabaya (04/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia, seiring dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2025.

Peringatan tahun ini mengangkat tema global 'Reporting in the Brave New World - The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media' atau dalam Bahasa Indonesia, "Pelaporan di Dunia Baru yang Berani - Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Kebebasan Pers dan Media".

Tema ini mencerminkan perhatian dunia terhadap pengaruh masif teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI), terhadap jurnalisme dan ekosistem media.

Dalam pernyataannya, Reni menyampaikan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian

esensial dari demokrasi dan menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi, keadilan, serta partisipasi publik.

"Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Pers harus tetap independen, kritis, dan dilindungi dari tekanan apa pun, baik dari kekuasaan maupun teknologi," tegasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, tidak boleh terjadi lagi Tindakan represif dari oknum aparat kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana yang sempat terjadi beberapa Waktu lalu.

"kita pastikan bersama, keamanan dan kebebasan para jurnalis dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menyajikan fakta dan data kepada publik", tegas Reni.

Politisi PKS asal Surabaya ini juga menyoroti pentingnya pengaturan dan pengawasan yang bijak terhadap penggunaan AI dalam industri media. Menurutnya, teknologi harus menjadi alat bantu, bukan alat yang mengancam integritas jurnalisme.

"Kecerdasan Buatan bisa mempercepat kerja redaksi, tapi juga bisa disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi. Maka regulasi dan literasi teknologi sangat penting untuk melindungi ruang informasi publik," ujarnya.

Reni juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dibarengi dengan tanggung jawab etik dan profesionalisme dari para jurnalis. Ia mengapresiasi kerja-kerja jurnalistik yang tetap teguh di tengah berbagai tantangan, termasuk tekanan politik, ekonomi, hingga



"Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Pers harus tetap independen, kritis, dan dilindungi dari tekanan apa pun, baik dari kekuasaan maupun teknologi,

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I

ancaman digital.

"Dari sisi jurnalis, kita juga berharap kebebasan pers yang ada dapat dijalankan dengan tanggung jawab dan nilai-nilai etis yang menjadi pedoman dalam bertugas. Jangan sampai ada oknum jurnalis yang keluar dari tanggung jawab dan nilai etis yang ada", ujar Reni.

Sebagai penutup, Reni mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi. "Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025. Mari bersama-sama jaga integritas informasi dan kebebasan berekspresi demi kemajuan bangsa," pungkasnya.



Hari Kebebasan Pers Sedunia,

Saadiah Uluputty Sampaikan Kebebasan Pers Pilar Demokrasi, Harus Dijaga di Era Digital

Jakarta (05/05) — Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada 3 Mei, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty,

menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi, terutama di tengah tantangan era digital.

"Kebebasan pers bukan sekadar hak jurnalis untuk melaporkan berita, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya," ujar Saadiah.

Ia menyoroti bahwa meskipun kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius, termasuk kekerasan terhadap jurnalis dan tekanan terhadap media independen.

Mengutip data dari Aliansi

Jurnalis Independen (AJI), Politi PKS ini sampaikan hingga Mei 2025, telah terjadi 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Survei AJI juga menunjukkan bahwa 75,1 persen jurnalis pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun digital. Indeks Kebebasan Pers Indonesia pun merosot ke posisi 127 dari 180 negara, turun dari posisi 111 pada tahun sebelumnya.

Saadiah juga menyoroti tantangan dari perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Tema Hari Kebe-

basan Pers Sedunia 2025, 'Reporting in the Brave New World: The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media,' menyoroti dampak besar AI terhadap jurnalisme dan media. AI dapat membantu mempercepat kerja redaksi, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi dan mendukung jenis penyensoran baru.

Sebagai legislator, Saadiah menekankan perlunya regulasi dan literasi teknologi yang bijak untuk melindungi ruang informasi publik.

"Kita harus memastikan bahwa teknologi menjadi alat bantu, bukan alat yang mengancam integritas jurnalisme," tegasnya wakil rakyat Maluku ini.

Di sisi lain, Saadiah juga menyoroti kesejahteraan jurnalis sebagai pekerja. Ia menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap wartawan televisi di Indonesia belakangan ini bukan sekadar problem ketenagakerjaan, tetapi juga gejala matinya ruang-ruang produksi jurnalisme berkualitas.

Sebagai anggota Komisi IV DPR I yang membidangi urusan pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan, Saadiah melihat pentingnya peran pers dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di sektor-sektor tersebut.

"Pers yang bebas dan independen dapat membantu mengangkat isu-isu yang sering



"Kebebasan pers bukan sekadar hak jurnalis untuk melaporkan berita, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

luput dari perhatian publik dan kebijakan negara," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Saadiah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung kemerdekaan pers

sebagai pilar demokrasi.

"Mari bersama jaga integritas informasi dan kebebasan berekspresi demi kemajuan bangsa," pungkasan Saadiah Uluputty.



image istimewa

HNW Serukan untuk Konsisten Bela Gaza Perjuangkan Palestina Merdeka di Puncak Peringatan Milad PKS ke-23

Jakarta (04/05) — Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, menyerukan kepada para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus tidak lelah membela Gaza perjuangkan Palestina Merdeka, selain tentu tetap terus menjalankan tugas utama untuk terus berkhidmat melayani rakyat Indonesia, dengan aktif konstruktif berdemokrasi.

Ajakan untuk terus konsisten membela rakyat Palestina ini diserukannya lagi dalam acara Konsolidasi Nasional/Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) dan Puncak Milad PKS ke-23 pada Rabu (30/4) lalu dan juga kemudian pada saat pelantikan Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Pengurus Ranting (DPRa) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Kamis (01/05/2025).

Di acara Puncak Milad PKS ke-23, HNW sapaan akrabnya menyampaikan terkait peran PKS yang terus mengingatkan bahwa membela Gaza dan perjuangkan Palestina Merdeka adalah sikap yang justru sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia (khususnya alinea pertama dan keempat dari Pembukaan UUDNRI 1945) sebagaimana dipahami dan

diperjuangkan oleh Presiden-Présiden RI sejak Bung Karno hingga Prabowo.

“Dan PKS melakukan pembelaannya terhadap Gaza dan Palestina juga melalui forum-forum demokrasi seperti di DPR, MPR, turun bersama Rakyat demo bela Palestina, menyampaikan surat secara langsung ke Kedubes AS di Jakarta, maupun kantor perwakilan PBB di Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, PKS juga telah aktif juga ke lembaga-lembaga parlemen Internasional seperti PUIC, IPU, bahkan ke kantor pusat PBB di New York maupun kantor pusat OKI di Jeddah.

HNW juga menceritakan kembali kunjungannya yang kebersamaan delegasi anggota DPR RI dari FPKS ke Mahkamah Internasional (International

HNW Serukan untuk Konsisten Bela Gaza Perjuangkan Palestina Merdeka di Puncak Peringatan Milad PKS ke-23

« SEBELUMNYA

Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada pertengahan April lalu untuk memberikan dukungan kepada dua Mahkamah itu agar dapat melaksanakan keputusan-keputusannya mereka soal ilegalnya pendudukan Israel atas Palestina dan agar Israel

meninggalkan tanah2 jajahannya dalam waktu 12 bulan, juga dalam hal melaksanakan keputusan ICC yaitu sanksi kepada pimpinan Israel yang bertanggung jawab melakukan genosida di Gaza, Palestina, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

“Kami secara langsung telah menyampaikan dukungan, dan mengingatkan agar kedua

“Kami secara langsung telah menyampaikan dukungan, dan mengingatkan agar kedua Mahkamah itu serius melaksanakan keputusannya, untuk menghentikan kejahatan penjajahan Israel, menegakkan hukum dan keadilan kepada rakyat Gaza/Palestina, agar kejahatan Israel dapat dihentikan dan diberikan sanksi yang keras. Selain itu, yang paling mendesak saat ini adalah agar kejahatan Israel melakukan blokade total Israel atas Gaza segera dihentikan dengan segera dibukanya akses bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza/Palestina,” ujarnya.

Mahkamah itu serius melaksanakan keputusannya, untuk menghentikan kejahatan penjajahan Israel, menegakkan hukum dan keadilan kepada rakyat Gaza/Palestina, agar kejahatan Israel dapat dihentikan dan diberikan sanksi yang keras. Selain itu, yang paling mendesak saat ini adalah agar kejahatan Israel melakukan blokade total Israel atas Gaza segera dihentikan dengan segera dibukanya akses bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza/Palestina,” ujarnya.

Di dalam Puncak Milad PKS ke-23 yang bertajuk ‘Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdikan’ tersebut, HNW menegakkan sikap PKS yang juga sejalan dan mendukung Pemerintah Indonesia dalam terus melakukan pembelaan kepada rakyat Palestina untuk menghadirkan Palestina merdeka dan segera diakhirinya penjajahan Israel di tanah Palestina.

HNW mengatakan bahwa sikap Presiden Prabowo yang terus memperjuangkan Palestina merdeka bukan kali ini saja. Ia mengingatkan pada 2014 lalu, ketika Prabowo diusung sebagai calon presiden (capres) oleh PKS, Prabowo bahkan turun langsung ikut demonstrasi bersama kami dan kader PKS membela Palestina.

“Demo PKS bersama Capres Prabowo di Bundaran HI tahun 2014 masih ada foto-fotonya. Dan sikap Pak Prabowo tidak pernah berubah ketika



Beliau menjabat sebagai Menhan, bahkan hingga saat ini saat Beliau mendapat amanat menjadi Presiden RI. Jadi, penting agar sikap bersama itu dikawal, dan didukung oleh kita semua, agar pembelaan terhadap Gaza hingga Palestina Merdeka dapat berhasil diwujudkan.

Dan saat itulah utang menyejarah Indonesia berupa merdekanya Palestina, terbayar lunas,” ujarnya.

Memang, lanjut HNW, ada pernyataan Presiden Prabowo sebelum keberangkatan kunjung lima negara di Timur

HNW Serukan untuk Konsisten Bela Gaza Perjuangkan Palestina Merdeka di Puncak Peringatan Milad PKS ke-23

« SEBELUMNYA

Tengah, untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, dengan melakukan evakuasi terhadap sebagian rakyat Palestina yang terluka, yatim piatu maupun yang trauma, ke Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa, yang harus dicatat adalah Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa hal itu baru akan dijalankan apabila semua pihak terkait di negara-negara Arab dan juga di Internal Palestina setuju. Dan kita mengetahui bahwa tidak ada pihak yang

menyetujui opsi 'merelokasi' warga Gaza keluar Palestina.

Faktanya, lanjut HNW, negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan bahkan pihak Palestina sendiri (baik pemerintah otoritas Palestina dan kelompok perlawanan) menyatakan tidak sepakat untuk memindahkan rakyat Palestina ke negara lain, dengan alasan apa pun, apalagi proposal Presiden AS Donald Trump, mereka sepakat menolak keras.

"Jadi, syarat yang telah disampaikan oleh Presiden Pra-

bowo sudah tidak terpenuhi," ujarnya.

Namun, HNW menegaskan bahwa spirit dan semangat untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza/ Palestina oleh Pemerintah Indonesia tidak boleh dinafikan dan tidak boleh berhenti.

"Semangat itu harus terus diupayakan untuk dilaksanakan, bekerja sama bersama dengan negara-negara lain dan lembaga2 internasional lainnya, agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa segera dibuka, agar tragedi genosida atas Gaza bisa dihentikan, agar keputusan Liga Arab dan KTT Menlu OKI terkait tidak direlokasinya warga Gaza ke luar Palestina dan bantuan serta pembangunan kembali Gaza, serta kemerdekaan Palestina, dapat diwujudkan," pungkasnya.



"Semangat itu harus terus diupayakan untuk dilaksanakan, bekerja sama bersama dengan negara-negara lain dan lembaga2 internasional lainnya, agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa segera dibuka, agar tragedi genosida atas Gaza bisa dihentikan, agar keputusan Liga Arab dan KTT Menlu OKI terkait tidak direlokasinya warga Gaza ke luar Palestina dan bantuan serta pembangunan kembali Gaza, serta kemerdekaan Palestina, dapat diwujudkan



image Istimewa

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Bertemu Sekjen Persatuan Pramuka Muslim Dunia, HNW Dukung Suksesnya Jambore Pramuka Muslim se-Dunia

Jakarta (09/05) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan kehormatan Zuhair Hussein Ghanim Sekretaris Jenderal World Moslem Scout (Asosiasi Pramuka Muslim se Dunia), dan yang juga Sekretaris Jendral Interreligious Youth Solidarity.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara 3 Kompleks parlemen Jakarta, Kamis (08/05/2025).

Dalam kunjungannya, Zuhair Hussein Ghanim didampingi pimpinan Panitia Jambore Pramuka Muslim Dunia tahun 2025. Jambore ini merupakan rangkaian dari kegiatan

Menurut Zuhair, Sekjend organisasi pramuka muslim se dunia yang merupakan salah satu lembaga di bawah OKI, jambore muslim memang sudah pernah terlaksana di beberapa tempat di dunia. "Tetapi Jambore Muslim Internasional yang melibatkan pesantren dan sekolah Islam berskala internasional, baru pertama kali ini akan dilaksanakan di Indonesia oleh gerakan Pramuka dari Gontor," ujarnya.

peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.

Sementara kehadiran Zuhair Hussein Ghanim ke Indonesia, untuk melihat secara langsung persiapan penyelenggaraan Jambore tersebut, yang akan diselenggarakan di Buperta, Cibubur, September 2025.

Dalam pertemuan, itu Zuhair secara terbuka menyampaikan apresiasi atas persiapan Jambore yang menurutnya merupakan persiapan terbaik yang pernah ia temui.

"Persiapannya sudah dilaksanakan secara profesional, detail dan antipatif dan kolaboratif. Apalagi Jambore muslim Internasional, itu merupakan yang pertama dilaksanakan di dunia," ujar Zuhair.

Karena itu, Zuhair mendukung agar kegiatan tersebut terlaksana dengan sukses dan secara berkelanjutan, baik di Indonesia maupun tempat-tempat lain.

Menurut Zuhair, Sekjend organisasi pramuka muslim se dunia yang merupakan salah satu lembaga di bawah OKI, jambore muslim memang sudah pernah terlaksana di beberapa tempat di dunia.

"Tetapi Jambore Muslim Internasional yang melibatkan pesantren dan sekolah Islam berskala internasional, baru pertama kali ini akan dilaksanakan di Indonesia oleh gerakan Pramuka dari Gontor," ujarnya.

Bertemu Sekjen Persatuan Pramuka Muslim Dunia, HNW Dukung Suksesnya Jambore Pramuka Muslim se-Dunia

« SEBELUMNYA

Karena itu, Zuhair menyatakan mendukung penuh pelaksanaan Jambore Muslim Internasional tahun 2025, dengan akan mengajak Pramuka2 dari berbagai negara Moslem untuk mengikuti Jambore ini.

Juga akan kembali menyampaikan ke Sekretaris Jendral OKI (Hussain Ibrohim Thoha) undangan dari Panitia

Jambore yang pernah secara langsung disampaikan oleh HNW saat bersama Pimpinan MPR bertemu Sekjend OKI di kantornya di Jeddah, 19 Desember 2024.

Pada kesempatan itu, Zuhair memuji perkembangan Pramuka di Indonesia yang menurutnya maju sangat pesat. Bahkan jumlah anggota Pramuka Indonesia mencapai lebih 25 juta dari keseluruhan

Menjawab komitmen dan harapan tamunya, HNW sapaan akrabnya menyampaikan apresiasi dan berharap agar dukungan dari Zuhair, tokoh asal Saudi Arabia yang juga pimpinan Asosiasi Parlemen Arab mantan aktifis Pramuka, akan benar-benar mensukseskan hajat besar Jambore Muslim se-Dunia dalam rangka peringatan 100 tahun pondok Gontor, Pesantren yang sangat dikenal aktif dalam kegiatan Pramuka, bahkan dalam skala dunia Internasional. Apalagi kegiatan ini juga didukung oleh Kwartir Nasional Pramuka.

anggota Pramuka di dunia sebanyak 38 jutaan anggota, lebih dari 58% anggota Pramuka dunia, adalah Pramuka Indonesia.

Menurut Zuhair 30% pemimpin dunia memiliki latar belakang sebagai anggota Pramuka. Bahkan, ditingkat dunia juga terdapat asosiasi parlemen yang pernah menjadi aktifis Pramuka.

Karena itu Zuhair mengajak HNW untuk aktif di asosiasi itu bahkan mengusulkan kepada HNW agar di Indonesia juga dibuat asosiasi anggota parlemen yang pernah menjadi anggota Pramuka.

Menjawab komitmen dan harapan tamunya, HNW sapaan akrabnya menyampaikan apresiasi dan berharap agar dukungan dari Zuhair, tokoh asal Saudi Arabia yang juga pimpinan Asosiasi Parlemen Arab mantan aktifis Pramuka, akan benar-benar mensukseskan hajat besar Jambore Muslim se-Dunia dalam rangka peringatan 100 tahun pondok Gontor, Pesantren yang sangat dikenal aktif dalam kegiatan Pramuka, bahkan dalam skala dunia Internasional. Apalagi kegiatan ini juga didukung oleh Kwartir Nasional Pramuka.

HNW juga menyatakan setuju untuk membentuk asosiasi anggota parlemen Indonesia yang pernah aktif di dunia Pramuka.

Karena itu, HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid akan



Image Istimewa

menghubungi pihak-pihak terkait untuk membentuk asosiasi anggota parlemen Indonesia yang memiliki latar belakang Pramuka.

"Apalagi karena Pramuka terbukti mampu mengembangkan sumber daya manusia baik bidang kepemimpinan, peradaban, juga kolaborasi dan komunikasi antar pihak di Indonesia maupun dengan dunia internasional," terang HNW yang sejak di Gontor

sudah aktif di gerakan Pramuka sebagai pengurus atau bahkan diutus mengikuti Jambore hingga tingkat Provinsi.

Keaktifan dalam dunia Pramuka itu oleh HNW berlanjut saat dirinya melanjutkan Pendidikan Tingginya di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Salah satunya karena pernah menempa diri di Pramuka.

Sebagai alumni pondok

Bertemu Sekjen Persatuan Pramuka Muslim Dunia, HNW Dukung Suksesnya Jambore Pramuka Muslim se-Dunia

◀ SEBELUMNYA

Gontor yang kini juga diamankan sebagai Ketua Badan Wakaf Ponpes Gontor, Gontor adalah lembaga yang sangat peduli terhadap kegiatan kepramukaan.

Karenanya ia sangat mengapresiasi kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas dari Panitia Jambore dan berharap dukungan Kwarnas dan semua pihak termasuk dari Zuhair Sekjend Persatuan Pramuka Muslim se-

Dunia demi suksesnya Jambore Pramuka Muslim Dunia tahun 2025 dalam rangka peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.

"Saat ini pendaftaran yang masuk sudah mencapai 13.000 peserta, dari target 15.000 peserta. Sebanyak 2000 peserta lainnya diharapkan akan dipenuhi oleh Pramuka dari negara-negara lain termasuk negara-negara anggota OKI, yang akan diusahakan oleh Zuhair. Sukses



image istimewa

kegiatan ini nantinya, akan menjadi tambahan nama baik Indonesia, dihadapan dunia internasional, khususnya anggota Pramuka Muslim Internasional," kata HNW.

Bagi Gontor sendiri, imbuhnya, sukses pelaksanaan Jambore Pramuka Muslim se Dunia tahun 2025, membuktikan konsistensi Gontor dengan kepramukaan nya.

"Terbukti dalam rangka peringatan 100 tahun berdirinya pun Gontor bahkan kembali membuat sejarah dengan hadirkan sunnah hasanah/tradisi baik, mengadakan Jambore Pramuka secara Internasional, yang menurut kesaksian Sekjend Persatuan Pramuka Muslim se Dunia, Zuhair Ghanim, adalah yang pertama di dunia," ungkap HNW.

Ini, kata HNW, menegaskan bahwa Gontor selalu menekankan nilai-nilai kependidikan-nya dalam penyiapan SDM unggul, berbasis nilai-nilai kepesantrenan untuk membangun peradaban unggulan, salah satunya melalui kegiatan Pramuka.

"Pramuka adalah kegiatan yang sangat positif, bisa menjadi alternatif kreatif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi generasi milenial/ gen Z/ generasi strawberry. Kalau mereka aktif dengan Pramuka, maka akan banyak persoalan dikalangan generasi muda yang mendapatkan koreksinya. Inilah salah satu



"Pramuka adalah kegiatan yang sangat positif, bisa menjadi alternatif kreatif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi generasi milenial/ gen Z/ generasi strawberry. Kalau mereka aktif dengan ber-Pramuka, maka akan banyak persoalan dikalangan generasi muda yang mendapatkan koreksinya

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

peran yang diambil Gontor, mendidik bukan hanya di dalam Pesantren tetapi melintasi batas pesantren, batas negara dan bahkan batas waktu; memasuki abad ke 2 nya, Gontor bahkan hadirkan kontribusi

baru yang harumkan nama Pesantren dan bangsa Indonesia di mata dunia dengan penyelenggaraan Jambore Muslim Internasional," pungkas HNW mengakhiri.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***